

Analisis Daya Tampung Lahan Pemakaman di Kota Makassar

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Hilmy Khalil Agus

4518042077



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2023

Analisis Daya Tampung Lahan Pemakaman di Kota Makassar

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh:

Muhammad Hilmy Khalil Agus

4518042077

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2023

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor: A.074a/SK/FT/UNIBOS/II/2023 Pada Tanggal 27 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Tutup Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Maka:

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Februari 2023

Skripsi Atas Nama : Muhammad Hilmy Khalil Agus

Nomor Pokok : 4518042077

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

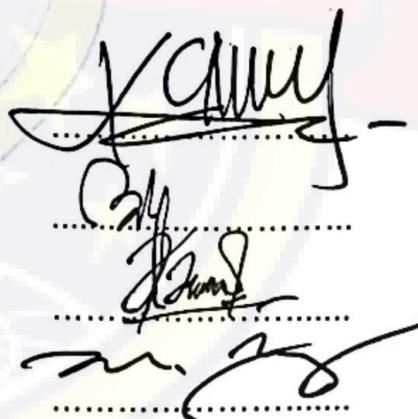
TIM PENGUJI

Ketua : Dr. S. Kamran Aksa, S.T, M.T.

Sekretaris : Tri Budiharto, S.T., M.Sc.,M.Eng

Anggota : 1. Rusneni Ruslan, S.T, M.Si.

2. Muh. Idris Taking, S.T.,MSP

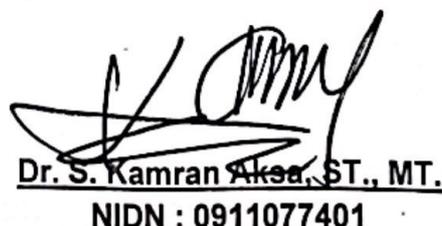


DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR



Dr. H. Nasrullah, ST., MT.
NIDN : 0908077301

KETUA PROGRAM STUDI
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.
NIDN : 0911077401

SKRIPSI

ANALISIS DAYA TAMPUNG LAHAN PEMAKAMAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh

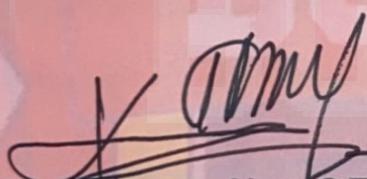
MUHAMMAD HILMY KHALIL AGUS
NIM 4518 042 077

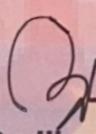
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 27 Januari 2023

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. S. Kamran Aksa, S.T., M.T
NIDN : 09-110774-01

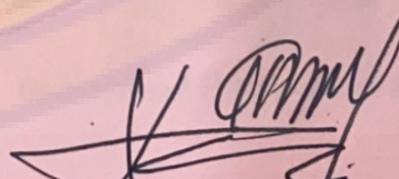

Tri Budiharto, S.T., M.Sc., M.Eng.
NIDN 09-100481-05

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota


Dr. H. Nasrullah, S.T, M,T
NIDN : 09-090773-01


Dr. S. Kamran Aksa, S.T., M,T
NIDN : 09-110774-01

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HILMY KHALIL AGUS

Nim : 45 14 042 077

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 November 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Hilmy Khalil Agus

ABSTRAK

Muhammad Hilmy Khalil Agus, 2022 “Analisis Daya Tampung Lahan Pemakaman di Kota Makassar”. Dibimbing oleh **S Kamran Aksa dan **Tri Budiharto****

Naik turunnya jumlah penduduk Kota Makassar dari tahun 2017-2021 berbanding lurus dengan naik turunnya jumlah kematian sehingga kebutuhan lahan untuk pemakaman tiap tahunnya pun juga terus bertambah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sisa lahan pemakaman dan daya tampung kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar 20 tahun kedepan setra menyusun arahan pengembangan lahan pemakaman di Kota Makassar. Penelitian ini mengguakan metode analisis deskriptif, proyeksi penduduk, daya tampung lahan pemakaman dan Analisis Swot. Berdasarkan hasil analisis daya tampung lahan pemakaman umum di Kota Makassar sudah tidak mampu menampung jumlah kematian hingga tahun 2041 dengan sistem normal dan berdasarkan hasil analisis swot untuk Arahan dalam pengembangan pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: pengoptimalisasian lahan pemakaman dan pemanfaatan peraturan terkait harga patok yang bukan penduduk asli Kota Makassar untuk pengendalian keterbatasan lahan pemakaman.

Kata-Kata Kunci : Daya Tampung, Kematian, Lahan Pemakaman, Arahan Pengembangan

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Teriring Rasa Puji dan Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta,ala senantiasa kita curahkan atas segala limpahan Rahmat dan Karunia serta Hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Daya Tampung Lahan Pemakaman di Kota Makassar**". Tugas Akhir ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana STRATA SATU (S-1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar dan merupakan salah satu proses akhir dari kegiatan pembelajaran di Universitas Bosowa pada Umumnya dan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota pada Khususnya.

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda **Agus Saharudin S.E** dan Ibunda Tercinta **Nurul Athira** serta saudara saya **Akbar Fitrah Tawwabin**.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., MSi** Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak **Dr. Ir Nasrullah, ST., M.T** Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak **Dr. S. Kamran Aksa ST., M.T** Selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar dan juga Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis.
4. Bapak **Tri Budiharto ,ST., MSc., M.Eng** Selaku Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Semua Pihak Pemerintah Kota Makassar antara lain Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar (DLH) dan UPT Pemakaman yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Saudara/Saudari Yang Saya Cintai Planologi 2018 (PEACE), yang telah menyempatkan waktunya untuk bertukar pikiran terkait penelitian skripsi ini dan senantiasa selalu saling memberikan support yang baik.

Penulisan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan dan isinya. Oleh karena itu, dengan indera dan hati terbuka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan

skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, November 2022

Penulis

Muhammad Hilmy Khalil Agus



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Ruang Lingkup Penelitian	4
F. Sistematika Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Teori Lahan.....	7
B. Karakteristik Lahan	9
C. Pemanfaatan Lahan.....	11
D. Teori Perkembangan Kota	12
E. Daya Tampung Sebagai Ambang Batas Lahan	14
F. Kematian	15
G. Pengertian Pemakaman	16
H. Jenis Pemakaman	18
I. Kebijakan Pengelolaan Pemakaman	21
J. Kerangka Pikir Penelitian	24
K. Penelitian Terdahulu / Road Map	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Penelitian	35
C. Metode Pengumpulan Data	36
D. Populasi dan Sampling	37
E. Variabel Penelitian	38
F. Metode Pengelohan dan Analisis Data	39
G. Definisi Operasional.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar	49
B. Perbandingan Persentasi Pertumbuhan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Kematian	58
C. Identifikasi Pemakaman Umum Milik Pemerintah di Kota Makassar	59
D. Daya Tampung Sebagai Ambang Batas	84
E. Arahlan Pengembangan Pemakaman di Kota Makassar	87
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3. 1 Model Penentuan Indikator Komponen Swot.....	44
Tabel 4. 1 Pembagian Kelurahan dan RW Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2022	50
Tabel 4. 2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Makassar dari Tahun 2017-2021 Menurut Kecamatan.....	52
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2021	54
Tabel 4. 4 Perkembangan Jumlah Kematian di Kota Makassar dari Tahun 2017-2021.....	56
Tabel 4. 5 Jumlah Kematian Menurut Agama dan Bulan di Kota Makassar Tahun 2021.....	57
Tabel 4. 6 Perbandingan Persentase Pertumbuhan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Kematian di Kota Makassar	59
Tabel 4. 7 Dokumentasi Aktivitas di TPU Milik Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022.....	72
Tabel 4. 8 Proyeksi Angka Kematian untuk 20 Tahun kedepan dirinci per 5 tahun di Kota Makassar	84
Tabel 4. 9 Estimasi Kebutuhan Jumlah Lahan Pemakaman di Kota Makassar dalam 20 tahun kedepan	85
Tabel 4. 10 Daya Tampung Lahan Pemakaman di Kota Makassar.....	86
Tabel 4. 11 Analisis SWOT.....	89
Tabel 4. 12 Model Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS).....	90
Tabel 4. 13 Model Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFAS)	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	24
Gambar 3. 1 Kuadran SWOT.....	47
Gambar 4. 1 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Makassar di Tahun 2017-2021 Menurut Kecamatan.....	52
Gambar 4. 2 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2021	54
Gambar 4. 3 Grafik Perkembangan Jumlah Kematian di Kota Makassar 2021	56
Gambar 4. 4 Grafik Jumlah Kematian Menurut Agama dan Bulan di Kota Makassar Tahun 2021	57
Gambar 4. 5 TPU Islam Dadi.....	61
Gambar 4. 6 TPU Islam Beroangin	62
Gambar 4. 7 TPU Islam Paropo.....	64
Gambar 4. 8 TPU Islam Maccini	65
Gambar 4. 9 TPU Islam Sudiang Raya	66
Gambar 4. 10 TPU Kristen Panaikang.....	67
Gambar 4. 11 TPU Kristen Pannara	68
Gambar 4. 12 Peta Lokasi TPU Islam Dadi.....	76
Gambar 4. 13 Peta Lokasi TPU Islam Beroanging.....	77
Gambar 4. 14 Peta Lokasi TPU Islam Paropo	78
Gambar 4. 15 Peta Lokasi TPU Islam Maccini	79
Gambar 4. 16 Peta Lokasi TPU Islam Sudiang Raya.....	80
Gambar 4. 17 TPU Kristen Panaikang	81
Gambar 4. 18 Peta Lokasi TPU Kristen Pannara	82
Gambar 4. 19 Peta Administrasi Kota Makassar.....	83
Gambar 4. 20 KAUADRAN SWOT	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Yang dimana Kota Makassar ini merupakan Kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar kelima di Indonesia. Kota Makassar merupakan salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, Dengan memiliki luas wilayah 175,77 km² dan jumlah penduduk 1.571,814 juta jiwa. Kota ini terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi yang menghadap Selat Makassar.

Perkembangan Kota Makassar yang sangat pesat terkait dengan berbagai macam pembangunan infrastruktur yang berlangsung tidak mengurangi dari pada halnya dengan jumlah penduduk yang pertahunnya sangat meningkat tinggi dibarengi dengan jumlah angka kematian yang cukup tinggi sehingga Kota Makassar membutuhkan lahan Pemakaman yang cukup mumpuni.

Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas lingkungan Hidup Kota Makassar sesuai tugas dan fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelayanan pemakaman, bidang pembangunan dan pemeliharaan makam di Kota Makassar. Sehingga dikeluarkannya peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman pengendalian pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Makassar yang menerapkan bahwa pemakaman dan pengabuan mayat yang merupakan hak dasar bagi penduduk Kota Makassar sehingga pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat perlu diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kota Makassar menerbitkan surat edaran Nomor 472.12/2701/Dukcapil tentang peningkatan pencatatan peristiwa kematian pemerintah daerah yang membidangi masalah pemakaman diwajibkan agar membuat buku pokok pemakaman. Dengan adanya buku maka setiap orang meninggal akan secara otomatis terdata dan dilaporkan di Dukcapil Kabupaten atau Kota dan akan menon-aktifkan orang tersebut. Dalam hal ini,terdapat sebuah masalah dalam menangani penyediaan lahan pemakaman umum di Kota Makassar seperti halnya dengan sempitnya penyediaan lahan pemakaman umum sehingga mempengaruhi kebutuhan lahan berupa jumlah penduduk dan angka kematian. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Makassar tentunya Dinas Lingkungan Hidup terkait berperan memberikan ketersediaan lahan pemakaman umum yang lebih luas agar jumlah penduduk dan angka kematian dapat terpenuhi antara ketersediaan lahan pemakaman umum dengan jumlah angka kematian.

Arahan pengembangan pemakaman umum di Kota Makassar mempunyai alasan utama yaitu pertama, sempitnya lahan pemakaman di kota Makassar akibat lahan pemakaman sudah hampir penuh, kedua, Kelangkaan ketersediaan lahan mengakibatkan masyarakat Kota Makassar mulai kesulitan mencari lahan untuk pemakaman baru di kota ini, ketiga, kebutuhan lahan meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan angka kematian. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kematian dan luas lahan pemakaman yang tersedia sehingga muncullah beberapa permasalahan tentang lahan pemakaman. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji bagaimana kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar kedepan dengan diharapkannya Kota Makassar memiliki kajian tentang pemakaman untuk 20 tahun kedepan maka dari itu diperlukan sebuah penelitian tentang **“Analisis Daya Tampung Lahan Pemakaman di Kota Makassar”** sehingga mampu memberikan inovasi pengembangan lahan pemakaman sesuai dengan aspek penataan ruang dalam hal ini menjaga pemanfaatan lahan perkotaan yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan wilayah studi di atas, maka permasalahan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu:

1. Identifikasi Sebaran Lahan Pemakaman di Kota Makassar?
2. Bagaimana Kebutuhan Pemakaman di Kota Makassar 20 Tahun Kedepan ?
3. Bagaimana Arah Pengembangan Lahan Pemakaman di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sebaran kondisi lahan Pemakaman di Kota Makassar.
2. Mengetahui kebutuhan lahan Pemakaman di Kota Makassar 20 Tahun kedepan.
3. Menyusun Arah Pengembangan lahan pemakaman di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Menjadikan bahan masukan bagi pemerintah Kota Makassar sebagai pengambil kebijakan penataan ruang dalam perencanaan Kota.
2. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi yang akan melakukan penelitian lanjutan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah atau kajian wilayah. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana pada studi penelitian ini membahas tentang daya tampung lahan pemakaman umum Kota Makassar milik pemerintah.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dari penelitian ini adalah mengetahui besaran daya tampung terhadap lahan pemakaman umum milik pemerintah sehingga menjadi dasar dalam menyusun arahan yang akan dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan lahan pemakaman Kota Makassar.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini pembahasan dilakukan dengan sistematika guna memudahkan dalam penganalisaan. Sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang melandasi dan berkaitan dengan kepentingan analisis studi antara lain teori lahan, karakteristik lahan, penggunaan lahan, pemanfaatan lahan, teori perkembangan kota, konsep daya tampung sebagai ambang batas lahan, kematian, pengertian pemakaman, jenis pemakaman, kebijakan pengelolaan pemakaman, kerangka pikir penelitian dan penelitian terdahulu/road map.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang diantaranya terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode pengolahan dan analisis data serta definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum wilayah Kota Makassar, perbandingan persentase pertumbuhan jumlah penduduk dengan kematian, identifikasi tempat pemakaman umum, kondisi tempat pemakaman umum, daya tampung sebagai ambang batas, arahan pengembangan pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman ditinjau dari aspek tata ruang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Lahan

Lahan (Land) adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Pengertian Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan baik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia (Undang-Undang No 37 Tahun 2014).

Lahan merupakan areal ataupun kawasan yang diperuntukkan buat pemakaian tertentu yang umumnya dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). Sebaliknya pola pemakaian lahan merupakan areal model ataupun wujud pemakaian lahan diterapkan, semacam perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan, serta lain-lain. (Haeruddin, 1997: 6)

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Pengertian lahan yaitu tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Misalnya dapat dikatakan: tata guna lahan di kota. Sebagaimana disebutkan di atas dalam

tata guna tanah, termasuk juga samudra dan laut serta daratan yang tidak dihuni (antartika) yang tidak ada pemilik perorangan atau lembaga, kalau pemiliknya adalah seluruh manusia. (Jayadinata 1999 : 10)

Lahan adalah sebagai ruang (space) yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, pengertian memandang lahan dari sudut ekonomi regional atau dari sudut pembangunan wilayah. Lahan dan manusia merupakan sumberdaya yang paling besar, karena dari campur tangan manusialah lahan yang ada dapat berubah/dirubah fungsinya misalnya dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau kawasan industri. Dengan demikian lahan adalah ruang di permukaan bumi dapat sebagai sumberdaya yang dapat dieksploitasi, di mana dalam pemanfaatannya hendaknya dilakukan secara benar dengan mempertimbangkan kelestariannya.

Lahan sebagai subjek penggunaan lahan aktivitas manusia terletak pada suatu batuan atau kelompok batuan dengan struktur geologi tertentu. Di permukaan bumi ini yang merupakan tempat bagi manusia melakukan hampir semua aktivitasnya terhadap berbagai tipe batuan dan struktur geologinya. Tipe batuan dan struktur geologi yang bervariasi tersebut memiliki karakteristik tertentu sebagai responnya terhadap aktivitas manusia untuk setiap batuan itu berbeda-beda, oleh sebab itu dalam melakukan evaluasi sumber daya lahan sebagai dasar untuk memanfaatkannya perlu memperhatikan fenomena geologi (Ernawati, 2003

dalam Kartikasari, 2011). Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) dalam Jalaluddin (2013) lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, hidrologi, dan vegetasi dimana variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi potensi penggunaannya. Sedangkan Lahan menurut Arsyad (2002) dalam Kartikasari (2011) diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, flora, fauna serta bentukan hasil budaya manusia. Dalam hal ini lahan yang 12 mengandung pengertian ruang dan tempat. Lahan juga diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan termasuk didalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang (Kartikasari, 2011).

B. Karakteristik Lahan

Lahan selalu berkaitan dengan keperluan dan kepentingan manusia. Makna suatu komponen lahan bagi kehidupan manusia dapat berubah sejalan dengan perubahan jaman. Jaman berubah berkenaan dengan perubahan aspirasi sosial, perspektif ekonomi, sosial politik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka pengertian lahan bersifat dinamis. Komponen lahan yang sama dan dalam keadaan yang sama, akan tetapi berada di tempat yang berbeda dapat bermakna lain bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat disebabkan karena komponen pendampingnya berbeda sehingga berinteraksi berbeda atau karena perbedaan kemudahan

mencapai tempat atau melintasi medan sehingga kesempatan penggunaannya berbeda. Semuanya ini selanjutnya mengubah masalah komparatifnya sehubungan dengan perbedaan teknik dan biaya pengusahaannya yang diperlukan. Maka lahan sebagai sumber daya berkekhasan tempat (location specific). Mengingat kedinamisan dan kekhasan tempat maka lahan dikatakan suatu sistem sumberdaya yang bermatra ruang dan waktu (Notohadiprawiro, 2006).

Beberapa sifat atau karakteristik lahan yang dikemukakan oleh Drabkin (1980) dalam Yusuf (2016) adalah sebagai berikut:

1. Secara fisik, lahan merupakan aset ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh kemungkinan penurunan nilai dan harga, dan tidak terpengaruhi oleh waktu, lahan juga merupakan aset yang terbatas dan tidak bertambah besar kecuali melalui reklamasi.
2. Perbedaan antara lahan tidak terbangun dan lahan terbangun adalah lahan tidak terbangun tidak akan dipengaruhi oleh kemungkinan penurunan nilai, sedangkan lahan terbangun nilainya cenderung turun karena penurunan nilai struktur bangunan yang ada di atasnya. Tetapi penurunan nilai struktur bangunan juga dapat meningkatkan nilai lahannya karena adanya harapan peningkatan fungsi penggunaan lahan tersebut selanjutnya.

3. Lahan tidak dapat dipindahkan tetapi sebagai substitusinya intensitas penggunaan lahan dapat ditingkatkan. Sehingga faktor lokasi untuk setiap jenis penggunaan lahan tidak sama.

4. Lahan tidak hanya berfungsi untuk tujuan produksi tetapi juga sebagai investasi jangka panjang atau tabungan. Keterbatasan lahan dan sifatnya yang secara fisik tidak terdepresiasi membuat lahan menguntungkan sebagai tabungan. Selain itu investasi lahan berbeda dengan investasi barang ekonomi yang lain, dimana biaya perawatannya (maintenance cost) hanya meliputi pajak dan interest charges. Biaya ini relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan lahan tersebut.

C. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan di definisikan sebagai segala macam bentuk intervensi manusia secara siklis dan permanen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat material maupun spiritual yang berasal dari lahan (Juhadi, 2007 dalam Amalia, 2016). Suyana (1988) dalam Amalia (2016) juga menegaskan bahwa pemanfaatan lahan merupakan perwujudan proses interaksi antar komponen lingkungan hidup yaitu antara manusia sebagai komponen biotik dan lahan sebagai komponen abiotik. Interaksi kedua komponen tersebut berlangsung dengan bervariasi dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.

Dijelaskan pula bahwa terwujudnya pola pemanfaatan lahan di suatu tempat dan dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab dan atau pembatas yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat, tercermin dalam jumlah populasi serta bentuk atau tingkat kebudayaan, dan kondisi tanah yang dipengaruhi oleh komponen-komponen lingkungan fisik lainnya. Meskipun terdapat beberapa definisi yang membedakan pengertian penggunaan dan pemanfaatan lahan, namun beberapa literatur mengatakan bahwa pengertian penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan adalah sama yaitu mengenai kegiatan manusia di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Vink, 1975 dalam Amalia, 2016).

D. Teori Perkembangan Kota

Menurut Bintarto (1977) dalam Syahar (2012) Kota dikatakan sebagai sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Oleh karenanya kota juga memiliki permasalahan yang kompleks karena di kota berkumpul banyak orang dengan kegiatan yang beragam dan kebutuhan yang berlainan antara satu dengan yang lain sehingga ada hal yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan permasalahan seperti

pemerataan pembangunan, ketentraman, kepadatan penduduk dan lainnya (Syahar, 2012).

Menurut Ilhami (1990) dalam Kurniawati (2010) sebagian besar terjadinya kota adalah berawal dari desa yang mengalami perkembangan secara pasti. Faktor yang mendorong perkembangan desa menjadi kota adalah karena desa berhasil menjadi pusat kegiatan tertentu, misalnya desa menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pertambangan, pusat pergantian transportasi, seperti menjadi pelabuhan, pusat persilangan/pemberhentian kereta api, terminal bus dan sebagainya.

Kota merupakan konsentrasi rumah tangga di pinggir-pinggir sungai yang diorganisasi mengelilingi penguasa atau biasanya pemimpin agama yang kemudian diteruskan pengendalian yang sistematis dan kontinu terhadap panen, tenaga kerja, dan lain-lain. Kota modern di barat pada abad pertengahan dan bahkan sebelum revolusi industri umumnya masih tergantung dari sistem pertanian yang belum memakai alat mesin disamping beberapa kota yang sekaligus memang menjadi pusat perdagangan nasional dan internasional. Keadaan tersebut menjadi sebab kota berkembang sangat terbatas dan bila kota bertumbuh di luar batas kemampuan suplai hasil pertanian (makanan) dari "hinterland" (daerah sekitarnya) maka kota tersebut akan mengalami kesulitan makanan, dan untuk mempertahankan eksistensi pertumbuhan tersebut sering dilakukan

penaklukan daerah sekeliling atau daerah lain demi memperbesar suplai bahan makanan (Kurniawati, 2010).

E. Daya Tampung Sebagai Ambang Batas Lahan

Konsep daya tampung sebenarnya kebalikan dari kepadatan penduduk namun dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan (Muta'ali, 2012). Apabila nilai kebutuhan lahan telah melebihi daya tampung maka telah melewati nilai ambang batas lahan pemukiman. Ambang batas dikenal dalam perencanaan kota sebagai batasan fisik yang dihadapi oleh kota yang akan diperluas dan biaya untuk mengatasi batasan-batasan ini. Analisis metode ambang batas memperlihatkan identifikasi atas batasan-batasan ambang batas. Perhitungan atas biaya ambang batas, dan penentuan tentang semua akibat pelampauan. Sesungguhnya metode ini memberikan sarana untuk evaluasi berbagai kemungkinan perkembangan kota. Pengalaman praktek dan penelitian paling mutakhir tidak hanya memastikan kegunaan analisis ambang batas dalam perencanaan kota tetapi juga menunjukkan kemungkinan yang amat luas bagi perkembangan analisis ambang batas selanjutnya dan untuk penerapan cara pemikiran yang menjiwai metode ini terhadap masalah-masalah perencanaan yang dianggap sebagai melebihi 20 lingkungan perkotaan klasik atau tradisional (Kozlowski, 1997). Nilai ambang batas berarti ukuran bagi lingkungan berupa areal lahan, daerah perairan badan air (sungai, danau, teluk, dll) serta ruang udara, yang

menyatakan batas tingkat pencemaran atau gangguan yang diperbolehkan memengaruhi lingkungan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Staf, 2018).

F. Kematian

Salah satu dari tiga komponen demografi yang mempengaruhi struktur penduduk adalah kematian atau mortalitas. Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk di suatu daerah akan berpengaruh pada pertumbuhan penduduk (Mantra, 2003 dalam Amalia, 2016). Mati merupakan peristiwa hilangnya semua tandatanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Utomo, 1985 dalam Amalia, 2016). Definisi tersebut menjelaskan bahwa keadaan mati hanya bisa terjadi jika sudah terjadi kelahiran hidup, dengan demikian keadaan mati selalu didahului oleh keadaan hidup, atau dengan kata lain, mati tidak pernah ada jika tidak ada kehidupan, sedangkan hidup selalu diawali dengan lahir hidup (live birth) (Mantra, 2003 dalam Amalia, 2016).

Semua penduduk tidak akan mengalami kemungkinan yang sama untuk meninggal. Perubahan tersebut tergantung dari beberapa faktor dan salah satu yang terpenting adalah masalah umur. Angka kasar tidak memperhitungkan faktor-faktor yang relevan tersebut yang dihasilkan hanya nilai rata-rata untuk semua penduduk yang meninggal (Pollard & Yusuf, 1984 dalam Amalia, 2016). Angka kematian memberikan informasi tentang kematian dalam suatu populasi. Ukuran dasar tingkat kematian kasar

adalah Crude Death Rate (CDR), yaitu jumlah kematian pada populasi per 1.000 individu dalam populasi pada tahun tertentu (Schatz, 2015 dalam Amalia, 2016).

G. Pengertian Pemakaman

Makam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tempat untuk memakamkan jenazah atau lubang dalam tanah yang di gunakan sebagai tempat untuk menyimpan atau menguburkan orang yang telah meninggal. Adapun pengertian tempat pemakaman umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membeda- bedakan agama dan golongannya (Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa)

Makam menurut Bahasa artinya kubur atau pekuburan sedangkan pemakaman adalah tempat mengubur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1987 penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman yang dimaksud dengan makam:

- a. Tempat Pemakaman Umum adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan social dan badan keagamaan.

c. Tempat Pemakaman Khusus adalah area tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Pemakaman menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar adalah memasukkan jenazah kedalam suatu liang lahad atau mengebumikan pada 25 tempat pemakaman yang telah disiapkan oleh pemerintah kota atau orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lainnya. Adapun untuk tempat pemakaman umum merupakan areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, golongan, bangsa atau kewarganegaraannya. Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di tempat pemakaman umum tersebut. Pengaturan atas tempat pemakaman umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat (Aji, Suprayogi, & Wijaya, 2015).

Kajian teori tentang pemakaman menurut Sofian (2015) memiliki beberapa bagian yang ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Sosiologi : pemakaman diperlukan sebagai perwujudan penghormatan terakhir untuk almarhumah dan bentuk partisipasi serta kepedulian relasi.
2. Psikologis : secara psikologis pemakaman diperlukan untuk memberikan kenangan serta dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan, dukungan moral tersebut didapat melalui simpati dan partisipasi tamu yang datang.
3. Kultural : sejak dahulu sudah ada budaya upacara pemakaman, kembali kepada kebutuhan diadakannya upacara pemakaman, yaitu penghormatan terakhir dan memori untuk almarhumah.
4. Antropologis : pemakaman diperlukan dalam hubungan antar manusia karena untuk membuat relasi serta membuat memori.

H. Jenis Pemakaman

Adapun untuk jenis pemakaman berdasarkan kepercayaan dan adat/budaya yang dianut masyarakat menurut Sofian (2015), antara lain adalah :

1. Pemakaman Katholik/ Kristen

Pemakaman Katholik/Kristen sebelumnya disebut Requiem Mass (liturgy). Roma adalah asal muasal budaya ini, dan dimulai sejak 1176-1185 sesudah masehi. Disini juga dipopulerkan busana funeral berwarna hitam. Eulogi (pidato berisi pujian bagi orang yang baru meninggal dunia) adalah salah satu bagian di pemakaman Katholik.

2. Pemakaman Budhha

Pemakaman Budhha ada karena kepercayaan mereka terhadap lingkaran kehidupan (reinkarnasi). Kematian bagi umat Budhha adalah hal kuat yang dilandasi ajaran Budhha. Ada beberapa culture dalam pemakaman Budhha, antara lain adalah Mataka-Vastra-Puja, menggunakan proses pembakaran jenazah serta membakarkan uang, pakaian serta kebutuhan jenazah. Mataka-bana proses pendoaan arwah sebelum arwah kedunia akhirat, dipercaya arwah akan menjenguk sanak saudaranya.

3. Pemakaman Islam

Pemakaman Islam diprioritaskan kepada doa terhadap arwah dan penyatuan jenazah dengan tanah.

4. Pemakaman Hindu/Antyesti

Pemakaman Hindu memiliki prosesi pemakaman yang memakan waktu cukup panjang. Sakraman antyesti yang merupakan proses dua penyucian, adalah upacara terakhir dari sebuah perjalanan hidup seorang manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman menjelaskan bahwa pengelolaan tanah tempat pemakaman di Indonesia dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Tempat Pemakaman Umum

Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya.

2. Tempat Pemakaman Bukan Umum

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah.

3. Tempat Pemakaman Khusus

Di samping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut di atas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali (Makam Wali Songo), Raja-raja (Pemakaman Imegiri), tempat pemakaman para Pahlawan dan Pejuang Bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda di tujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.

4. Krematorium

Tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun

Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

5. Tempat Penyimpanan Jenazah

Menurut adat yang masih berlaku di berbagai tempat di Indonesia, dikenal beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah di dalam tanah melainkan menyimpan jenazah di dalam lubang-lubang atau guagua ataupun menempatkan jenazah di tempat-tempat yang terbuka, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini dibatasi hanya pada tempat pemakaman umum milik pemerintah yang ada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu TPU yang merupakan tempat pemakaman umum yang digunakan untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia.

I. Kebijakan Pengelolaan Pemakaman

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar menjelaskan mengenai pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagai berikut :

1. Pemerintah kota menyiapkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi penduduk kota maupun penduduk luar kota
2. Pelayanan yang dimaksud meliputi :

- a. Pengangkutan jenazah
- b. Pemakaman/pengabuan
- c. Penggalian makam dan pemindahan mayat
- d. Pemugaran makam

Ketentuan perizinan lahan pemakaman di Kota Makassar juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar pada pasal 11 sebagai berikut:

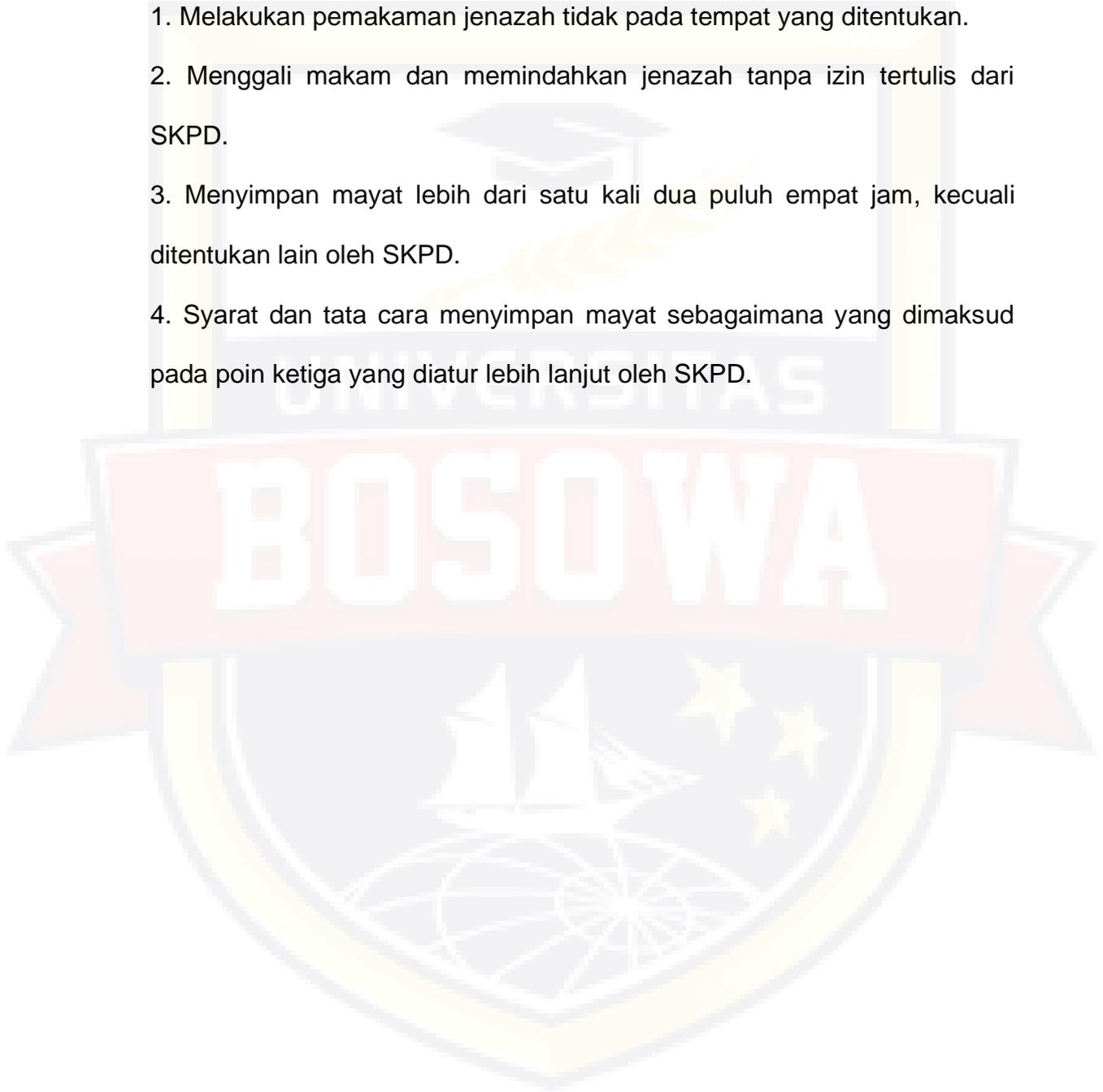
1. Setiap makam diberi tanda berupa nisan atau semacamnya dengan sistem dan penomoran sesuai yang ditetapkan SKPD.
2. Penomoran dimaksud harus sama dengan nomor urut pada buku register yang ada pada SKPD.
3. Buku register sebagaimana yang dimaksud memuat :
 - a. Tanggal dan lokasi pemakaman jenazah.
 - b. Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama/kepercayaan dan domisili terakhir, tanggal dan tempat meninggal dunia, penyebab kematiannya, besarnya retribusi serta nama dan domisili ahli waris.
4. Setiap makam disediakan tempat dengan ukuran maksimal panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan dalam minimal 1 (satu) meter.

Larangan yang terkait dalam pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Makassar juga dijelaskan dalam Peraturan

Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 pada Bab VIII pasal 13 bahwa

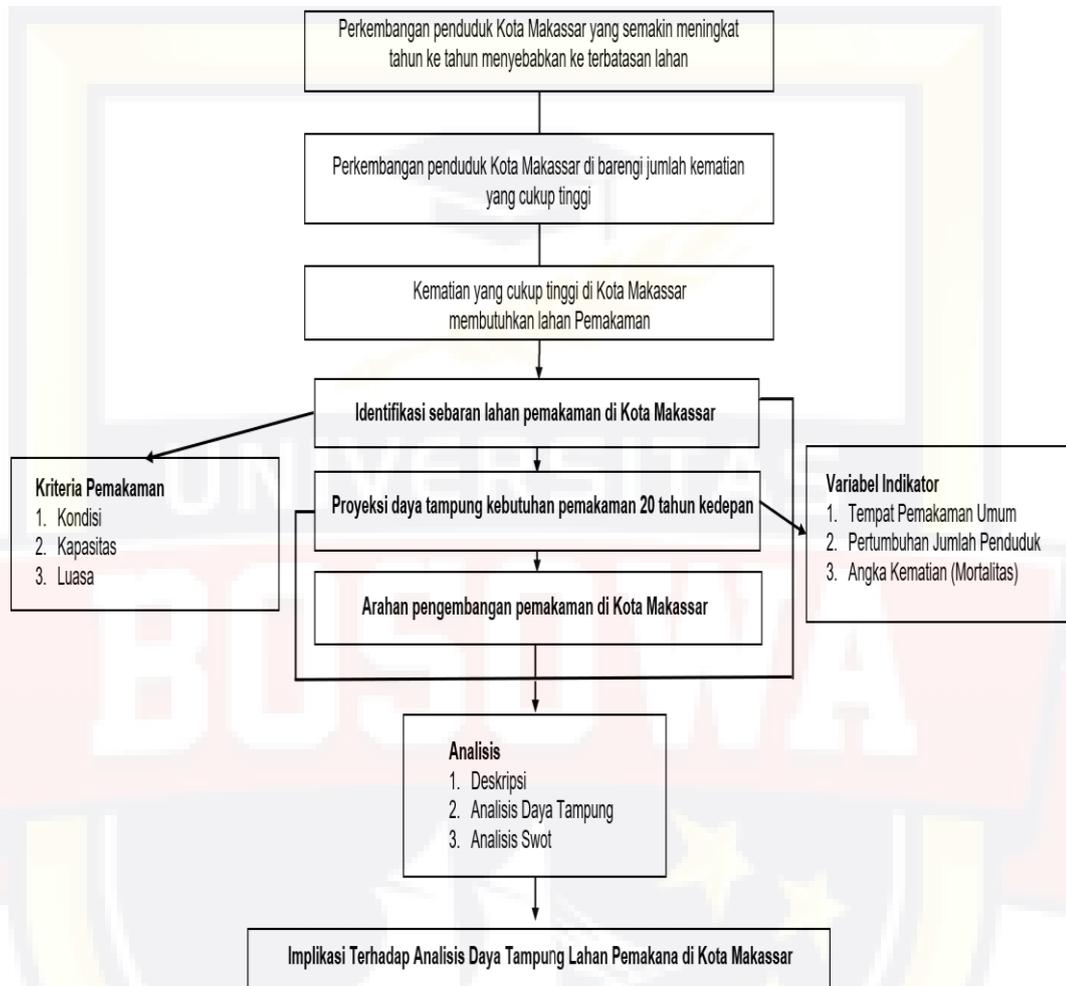
Setiap orang/penduduk dilarang :

1. Melakukan pemakaman jenazah tidak pada tempat yang ditentukan.
2. Menggali makam dan memindahkan jenazah tanpa izin tertulis dari SKPD.
3. Menyimpan mayat lebih dari satu kali dua puluh empat jam, kecuali ditentukan lain oleh SKPD.
4. Syarat dan tata cara menyimpan mayat sebagaimana yang dimaksud pada poin ketiga yang diatur lebih lanjut oleh SKPD.



UNIVERSITAS
BOSOWA

J. Kerangka Pikir Penelitian



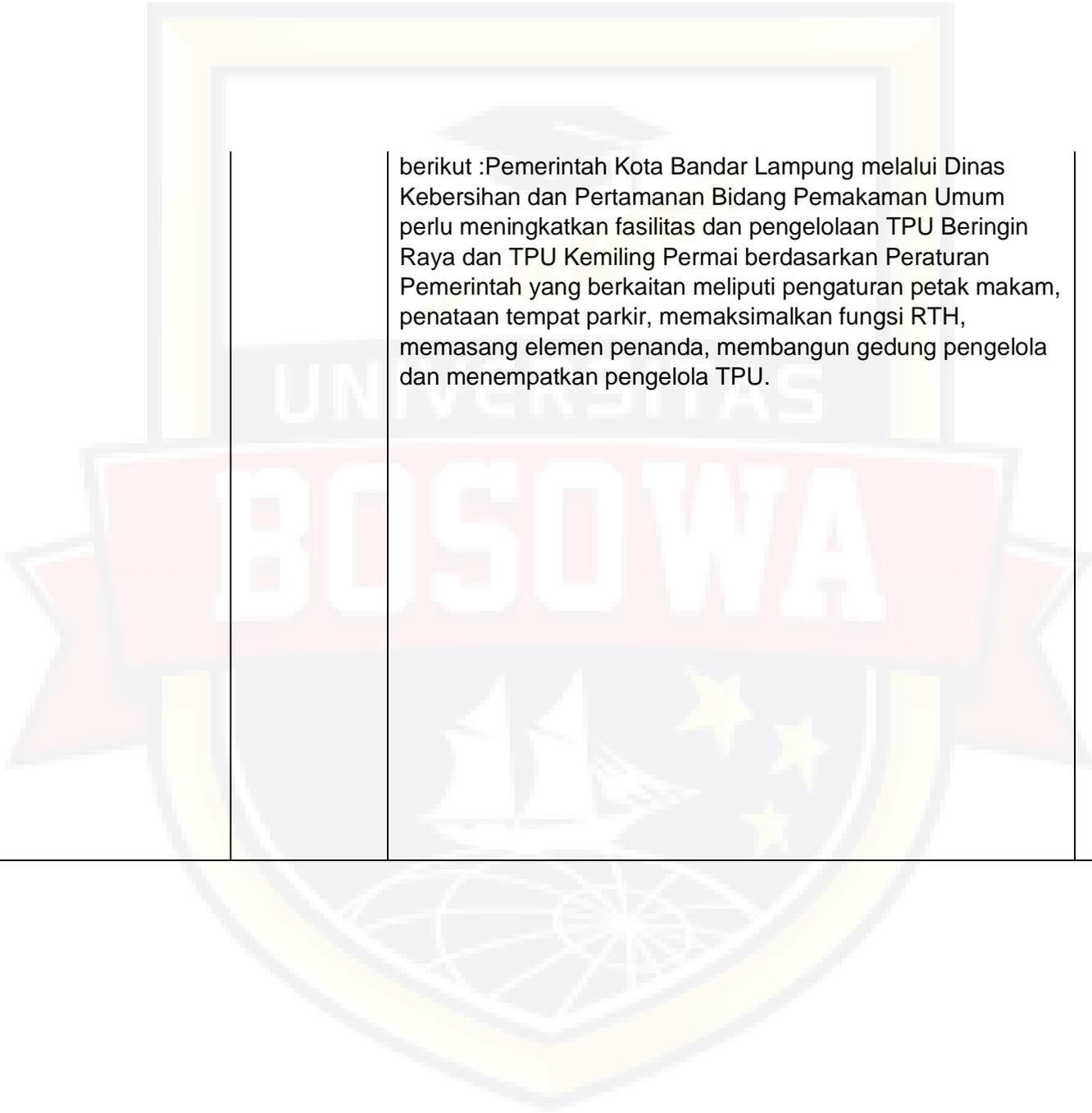
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

(Sumber : Penulis,2022)

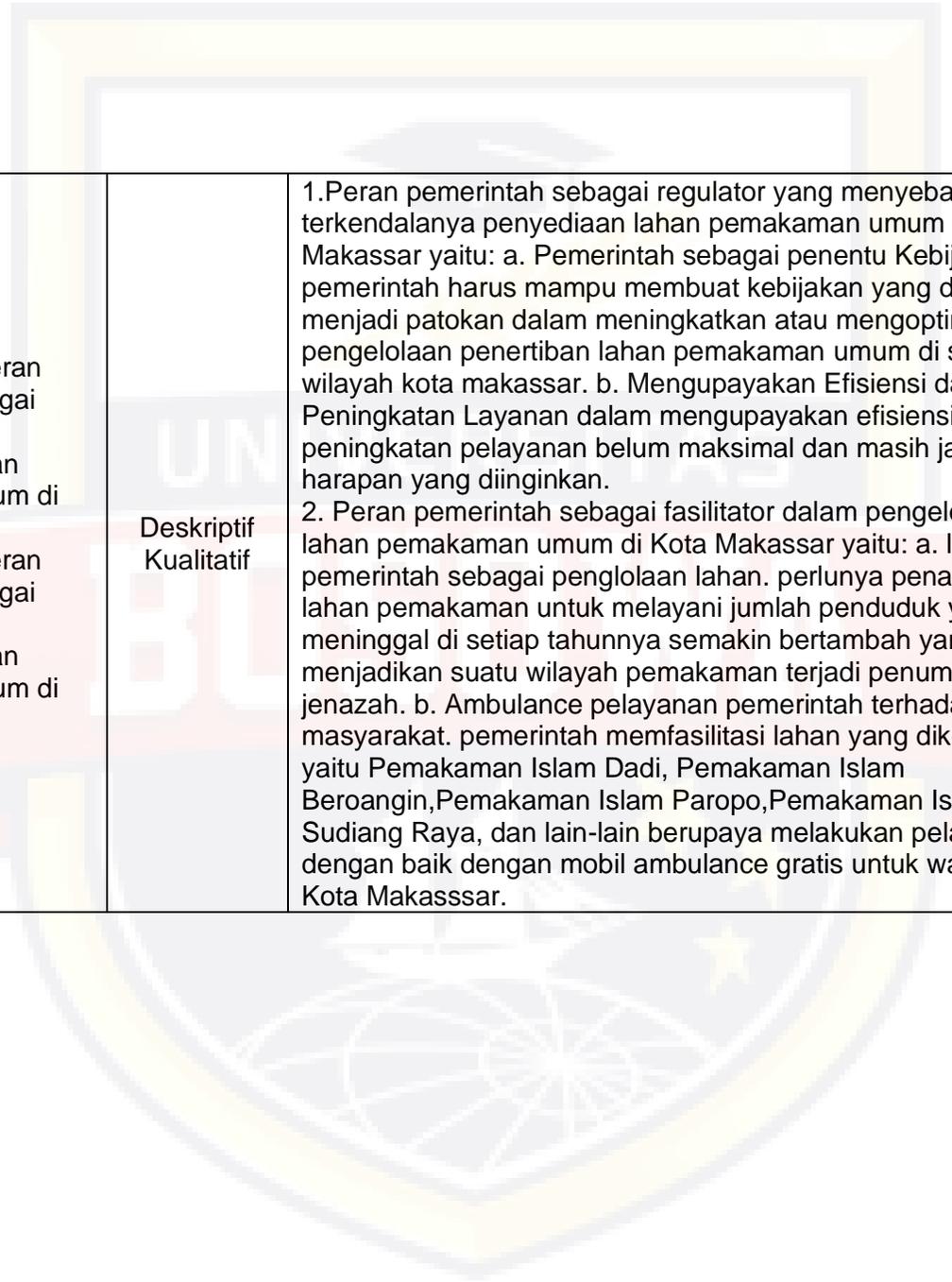
K. Penelitian Terdahulu / ROAD MAP

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

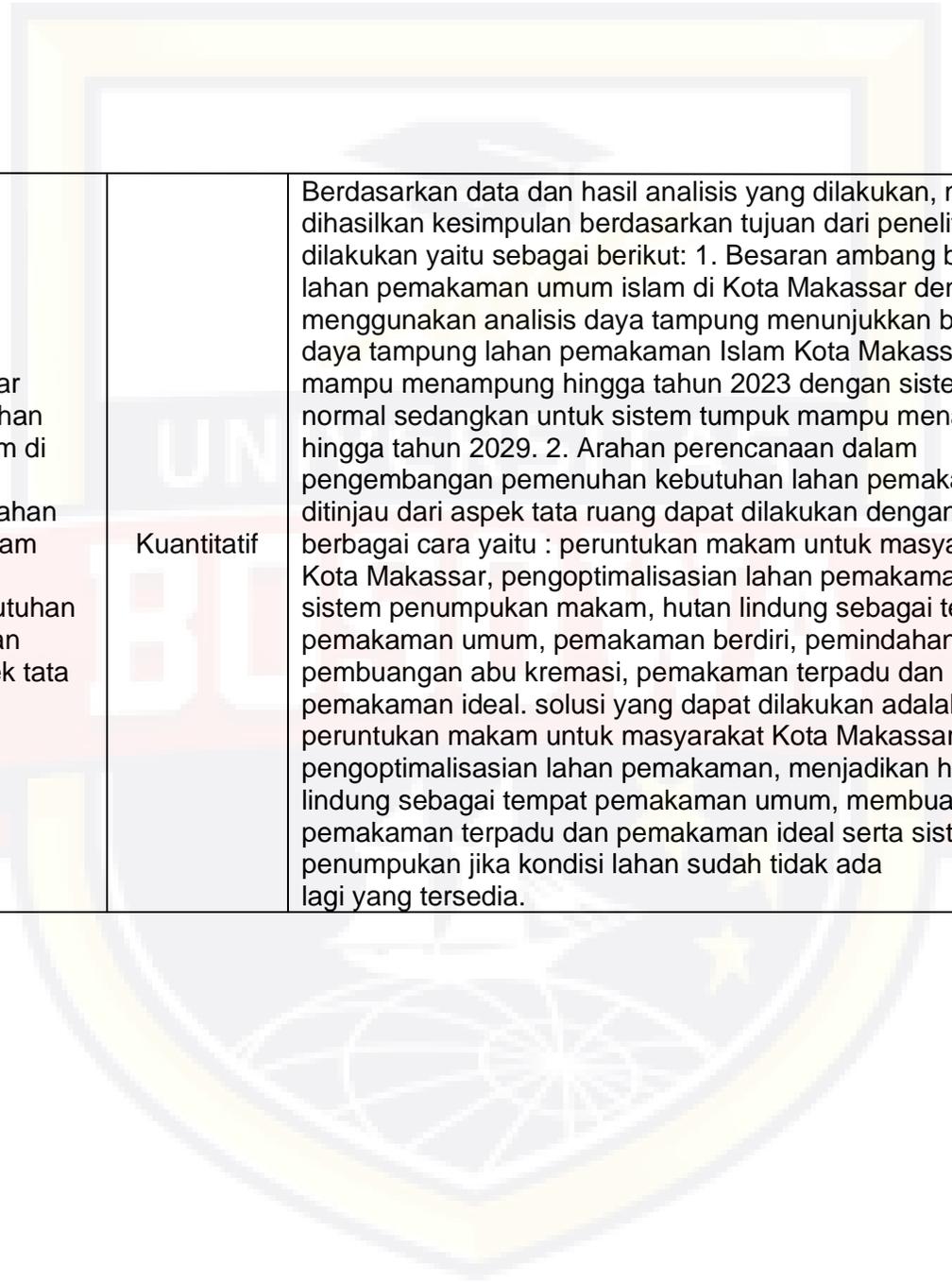
No	Judul dan Penulis	Rumusan Masalah	Metodologi Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
1	<p>Identifikasi Permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung . (Muliarta Diputra,Er nady Syaodih)</p>	<p>a. Bagaimana kondisi dan sebaran eksisting penyediaan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung ? b. Bagaimana permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung? c. Bagaimana kebutuhan lahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung dalam 20 tahun kedepan? d. Bagaimana upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung?</p>	<p>Kuantitatif dan Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Permasalahan dan solusinya, dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung. Beberapa kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi dan sebaran eksisting penyediaan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung saat ini adalah sebagai berikut : Kondisi TPU secara keseluruhan 49 TPU sudah penuh dan 161 TPU belumpenuh. 2. Permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :Permasalahan dua Tempat Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu TPU Beringin Raya dan TPU Kemiling Permai berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dari aspek fasilitas dan pengelolaan, TPU Beringin Raya cukup baik fasilitas dan pengelolaannya namun TPU Kemiling Permai belum baik dari aspek fasilitas dan pengelolaannya. 3. Kebutuhan lahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung dalam 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut :Perkiraan Kebutuhan petak makam dalam 20 tahun kedepan sebesar 146.086 unit petak makam sedangkan daya tampung yang tersedia sebesar 66.520 unit petak makam. 4. Upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung adalah sebagai 	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang Identifikasi Permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih terfokus dengan bagaimana kondisi sebaran tempat pemakaman,permasalahan tempat pemakaman, kebutuhan lahan tempat pemakaman, dan upaya meningkatkan pengelolaan serta pelayanan tempat pemakaman.</p>



berikut :Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Umum perlu meningkatkan fasilitas dan pengelolaan TPU Beringin Raya dan TPU Kemiling Permai berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan meliputi pengaturan petak makam, penataan tempat parkir, memaksimalkan fungsi RTH, memasang elemen penanda, membangun gedung pengelola dan menempatkan pengelola TPU.

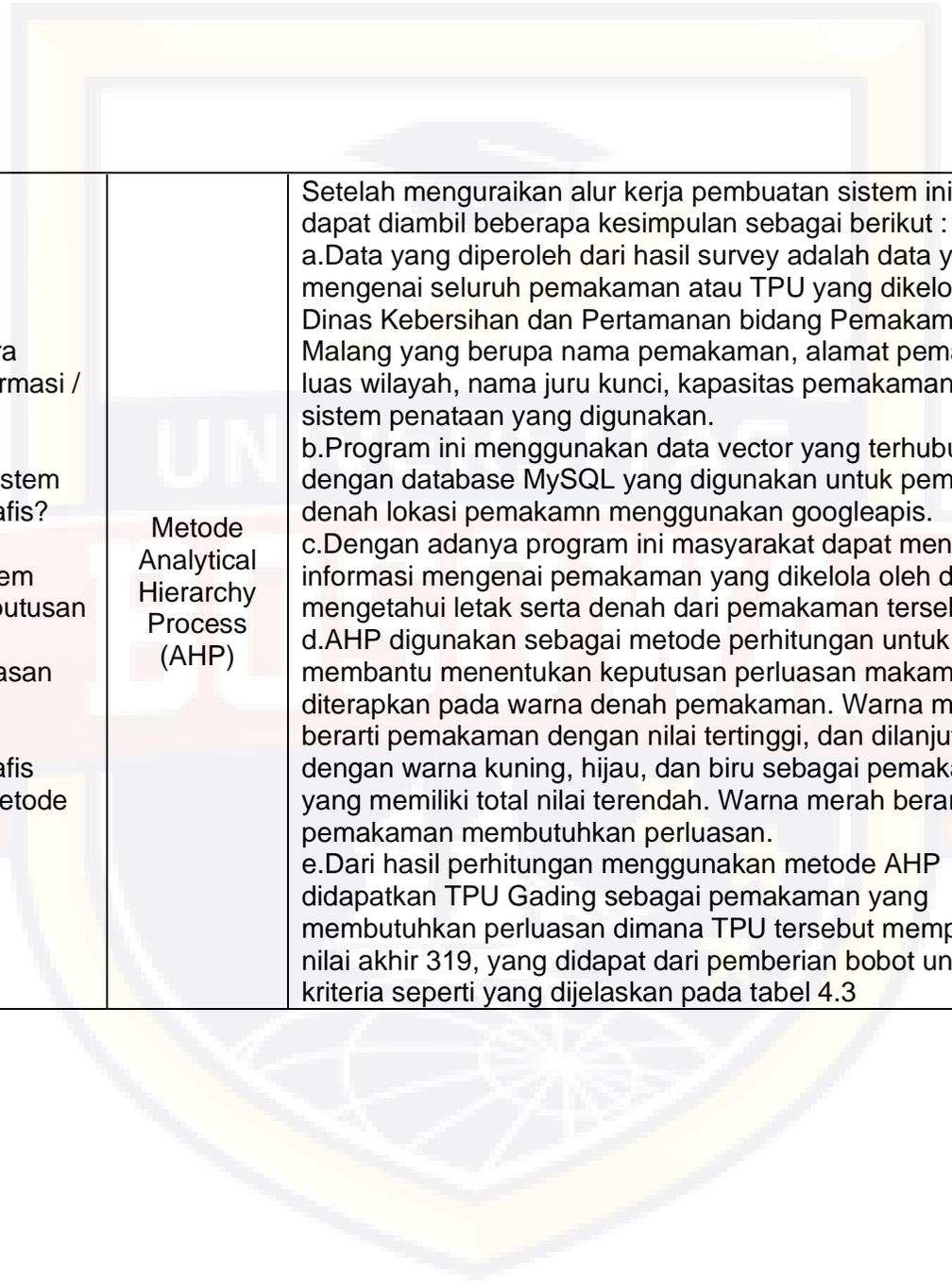


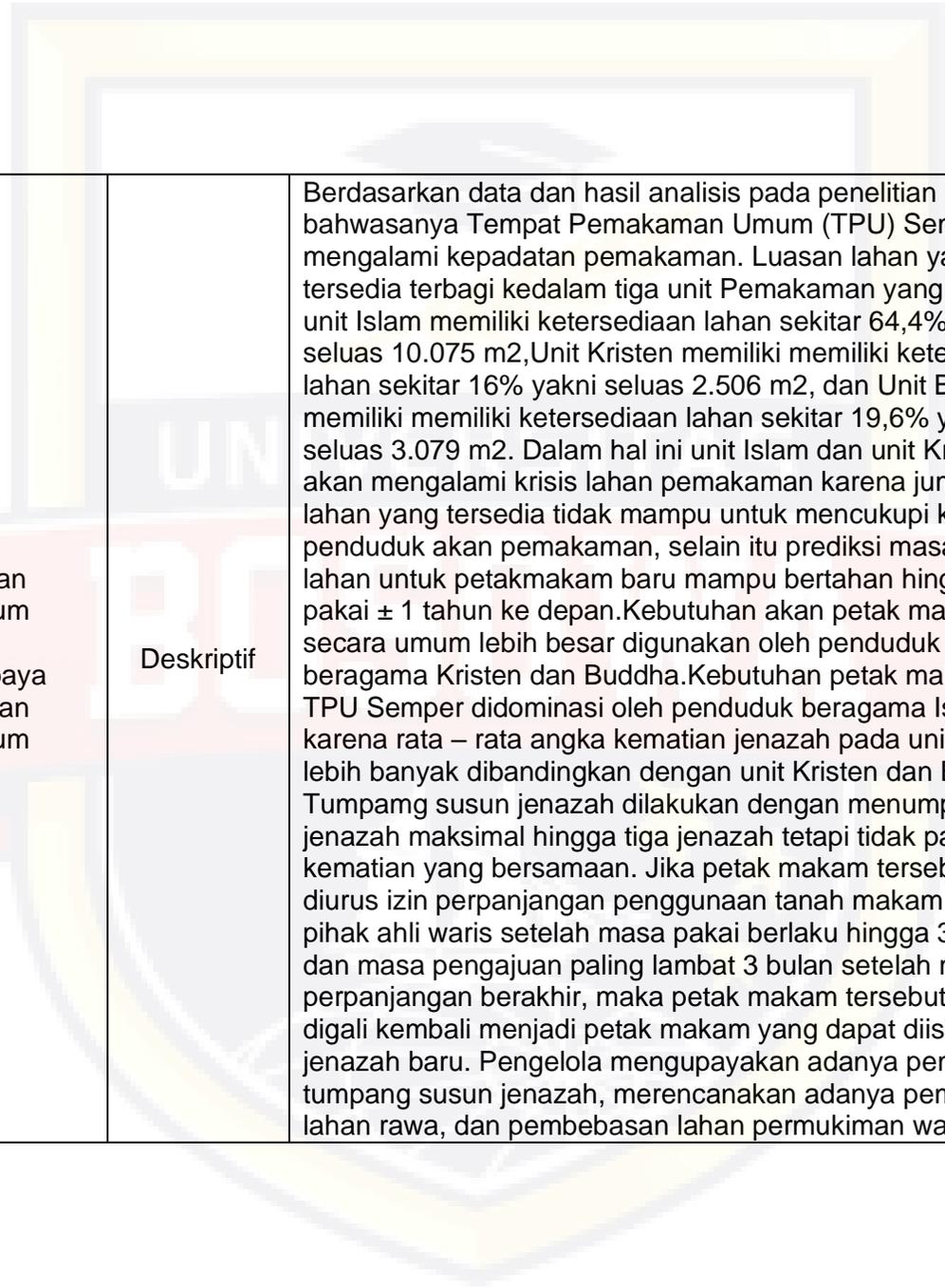
2	Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman Umum di Kota Makassar. (Nukmawati, Mappamiring, Ansyari Mone)	a. Bagaimana peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di Kota Makassar? b. Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di Kota Makassar?	Deskriptif Kualitatif	<p>1. Peran pemerintah sebagai regulator yang menyebabkan terkendalanya penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar yaitu: a. Pemerintah sebagai penentu Kebijakan pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang dapat menjadi patokan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan penertiban lahan pemakaman umum di setiap wilayah kota Makassar. b. Mengupayakan Efisiensi dan Peningkatan Layanan dalam mengupayakan efisiensi dan peningkatan pelayanan belum maksimal dan masih jauh dari harapan yang diinginkan.</p> <p>2. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di Kota Makassar yaitu: a. lahan pemerintah sebagai pengelolaan lahan. perlunya penambahan lahan pemakaman untuk melayani jumlah penduduk yang meninggal di setiap tahunnya semakin bertambah yang menjadikan suatu wilayah pemakaman terjadi penumpukan jenazah. b. Ambulance pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. pemerintah memfasilitasi lahan yang dikelola yaitu Pemakaman Islam Dadi, Pemakaman Islam Beroangin, Pemakaman Islam Paropo, Pemakaman Islam Sudiang Raya, dan lain-lain berupaya melakukan pelayanan dengan baik dengan mobil ambulance gratis untuk warga Kota Makassar.</p>	Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas Tentang Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman umum. Sedangkan dalam penelitian penulis ini lebih terfokus terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum sebagai regulator dan fasilitator bagi masyarakat.
---	---	--	-----------------------	---	--

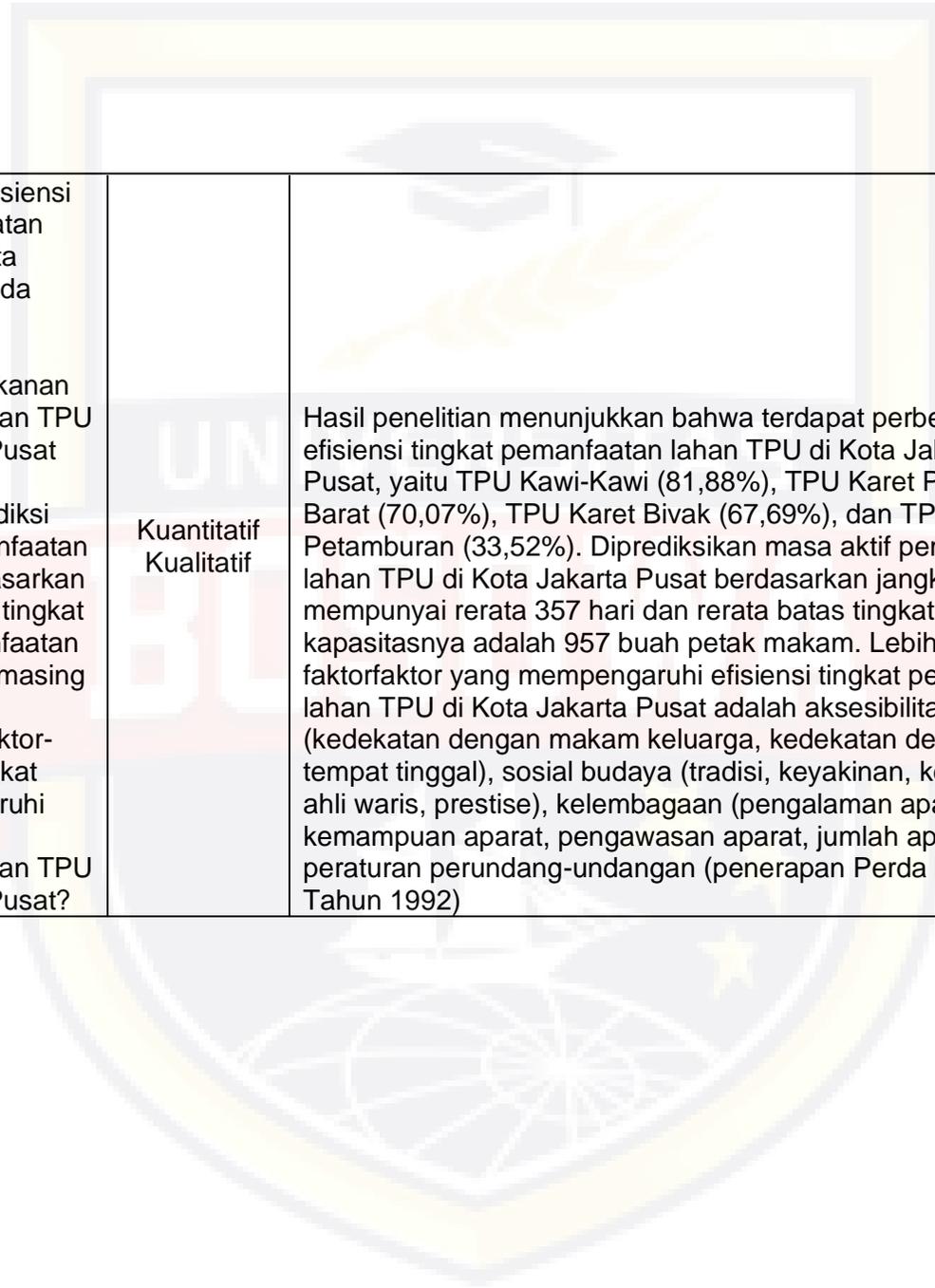


4	<p>Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (TPU Kota Pontianak). (Agustiah Wulandari)</p>	<p>a. Mengidentifikasi keadaan kawasan pemakaman Kota Pontianak? b. Menganalisis pemanfaatan kawasan pemakaman Kota Pontianak berdasarkan fungsi RTH?</p>	Kuantitatif	<p>Kawasan pemakaman di Indonesia berpotensi untuk dijadikan RTH jika dilihat berdasarkan fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi fisik Belum ada Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Pontianak yang dapat memenuhi fungsi fisik dari Ruang Terbuka Hijau (RTH). Agar dapat memenuhi fungsi fisik RTH tumbuhan pada kawasan ini perlu dirawat dengan baik dan ada petugas khusus yang bertugas untuk merawat makam. • Fungsi sosial: TPU Islam, TPU Kristen, TPU Tionghoa TPU Islam, TPU Kristen, TPU Tiong Hoa merupakan kawasan pemakaman umum sehingga para pengunjung bebas untuk masuk ke dalam pemakaman ini. Kawasan pemakaman ini memenuhi fungsi sosial RTH • Fungsi estetika: TPU Kristen dan TPU Tionghoa Tempat Pemakaman Kristen terdapat unsur-unsur buatan seperti patung yang menarik jika dilihat dari fungsi estetika. 	<p>perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih terfokus mengidentifikasi keadaan kawasan pemakaman dan menganalisis pemanfaatan kawasan pemakaman.</p>
5	<p>Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Surakarta. (Ghea Amalia, Djaka Marwasta)</p>	<p>a. Bagaimana kondisi ketersediaan lahan pemakaman umum di Kota Surakarta? b. Bagaimana upaya masyarakat Kota Surakarta untuk mengatasi lahan pemakaman yang sudah hampir penuh?</p>	Kuantitatif	<p>Berdasarkan uraian hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi ketersediaan lahan pemakaman di TPU Bonoloyo, TPU Untoroloyo, dan TPU Purwoloyo diprediksi hanya akan mampu menampung jenazah hingga 1 tahun kedepan untuk setiap TPU tersebut. Makam tumpang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan makam jika diterapkan dalam pelaksanaan pemakaman di Kota Surakarta, maka masing-masing TPU tersebut akan mampu menampung jenazah dalam jangka waktu hingga 66-77 tahun mendatang. 2. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi makam tumpang ditinjau dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan respon. Total nilai kesiapan masyarakat adalah sebesar 2,419 . 	<p>Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Surakarta. Sedangkan dalam penelitian penulis ini lebih terfokus terhadap kondisi ketersediaan lahan pemakaman dan upaya masyarakat Kota Surakarta untuk mengatasi lahan pemakaman yang sudah penuh</p>

No	Judul dan Penulis	Rumusan Masalah	Metodologi Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
6	Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Sebagai Kontribusi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Sleman (Muhammad Thoriq Ibnu Ziad)	a. Bagaimana latar belakang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam membuat Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Seyegan? b. Bagaimana penyediaan tanah untuk pembangunan Tempat Pemakaman Umum ? c. Bagaimana Pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Tempat Pemakaman Umum? d. Bagaimana peran TPU dalam memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sleman?	Kuantitatif dan Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Sleman membangun Tempat Pemakaman Umum dilatar belakangi hal-hal berikut antara lain: kebutuhan akan lahan pemakaman umum yang tanpa membedakan agama, ras dan suku bangsa; 2. Penyediaan tanah untuk pembangunan TPU dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengadakan kegiatan yang antara lain: Pencarian lahan yang sesuai dengan kriteria lahan pemakaman yaitu tidak pada lokasi yang subur maupun padat penduduk akan tetapi mempunyai nilai strategis fungsi makam. 3. Pengelolaan TPU merupakan suatu hal mengenai kegiatan yang dilakukan di TPU adapun kegiatan pengelolaan antara lain: Pelaksanaan pengelolaan TPU yang menyangkut pihak pengelola TPU sebagai pelaksana dalam menjalankan aturan pengelolaan TPU, dalam hal ini adalah UPT Pemakaman sebagai satuan unit pelaksana. 4. Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), TPU yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sleman dengan konsep taman mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi keberadaan RTH publik Kabupaten Sleman dengan luasan 47.152,5 m ² lahan yang tidak terbangun sehingga dapat dimanfaatkan untuk ruang makam dengan tutupan vegetasi di atasnya, melebihi taman yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2007 hingga 2010 yang hanya mencapai luas 26.565,84 m ² , sehingga Keberadaan TPU ini sendiri dimasa mendatang mempunyai prospek yang cukup baik untuk keberadaan RTH kawasan perkotaan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas Tentang Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Sebagai Kontribusi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih terfokus meneliti tentang kebijakan pemerintah daerah Kab.Sleman membuat tempat pemakaman umum, penyediaan tanah untuk pembangunan tempat pemakaman,pengelolaan terhadap tempat pemakaman, dan peran tpu dalam memenuhi ketersediaanRuang terbuka hijau (RTH).







9	Eksistensi tempat pemakaman umum di Kota Jakarta Pusat (APRYANTO, Dwi, Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP.,MSc.,Ph.D)	<p>a. Bagaimana efisiensi tingkat pemanfaatan lahan TPU di Kota Jakarta Pusat pada masing-masing kawasan?</p> <p>b. Bagaimana tekanan pemanfaatan lahan TPU di Kota Jakarta Pusat yang ditinjau berdasarkan prediksi masa aktif pemanfaatan lahan TPU berdasarkan waktu dan batas tingkat kapasitas pemanfaatan lahan di masing-masing kawasan?</p> <p>c. Mengetahui faktor-faktor dan peringkat yang mempengaruhi efisiensi tingkat pemanfaatan lahan TPU di Kota Jakarta Pusat?</p>	Kuantitatif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efisiensi tingkat pemanfaatan lahan TPU di Kota Jakarta Pusat, yaitu TPU Kawi-Kawi (81,88%), TPU Karet Pasar Baru Barat (70,07%), TPU Karet Bivak (67,69%), dan TPU Petamburan (33,52%). Diprediksikan masa aktif pemanfaatan lahan TPU di Kota Jakarta Pusat berdasarkan jangka waktu mempunyai rerata 357 hari dan rerata batas tingkat kapasitasnya adalah 957 buah petak makam. Lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi tingkat pemanfaatan lahan TPU di Kota Jakarta Pusat adalah aksesibilitas lokasi (kedekatan dengan makam keluarga, kedekatan dengan tempat tinggal), sosial budaya (tradisi, keyakinan, kebebasan ahli waris, prestise), kelembagaan (pengalaman aparat, kemampuan aparat, pengawasan aparat, jumlah aparat), dan peraturan perundang-undangan (penerapan Perda No. 2 Tahun 1992)</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas Tentang Eksistensi Tempat Pemakaman Umum di Kota Jakarta Pusat. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih terfokus meneliti tentang efisiensi tingkat pemanfaatan lahan TPU, perkiraan waktu dan tingkat batasan kapasitas pemanfaatan masing-masing lahan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dari tingkat pemanfaatan lahan TPU di Kota Jakarta Pusat.</p>
---	--	---	---------------------------	--	--

10	<p>Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman di Dinas Pemakaman Dan Pertamanan Kota Bandung (Sandi)</p>	<p>a. Bagaimana sistem dan prosedur yang di jalankan dalam pelayanan pemakaman yang di lakukan? b. Bagaimana perancangan pembangunan sistem informasi pelayanan pemakaman di bidang pemakaman? c. Bagaimana pengujian sistem informasi pelayanan pemakaman pada bidang pemakaman? d. Bagaimana implementasi sistem informasi pelayanan pemakaman pada bidang pemakaman?</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>Berdasarkan penelitian skripsi yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi pelayanan pemakaman yang penulis usulkan menjadikan sistem penyimpanan data menggunakan sistem database sehingga lebih mengamankan data-datayang berhubungan dengan pelayanan pemakaman. 2. Menjadikan sistem informasi ini lebih mudah dalam dalam membuat laporan dan mencetak laporan pelayanan pemakaman sesuai periode yang diinginkan Instansi DinasPemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. 3. Menghasilkan proses persetujuan dan pembayaran biaya retribusi menjadi sistem yang otomatis dalam memproses persetujuan yang di ajukan pemohon dan memproses biaya yang di bayarkan oleh pemohon dari layanan pemakaman yang di dapat tiap periodenya pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan kota Bandung. 	<p>Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman di Dinas Pemakaman Dan Pertamanan Kota Bandung. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih terfokus meneliti tentang sistem prosedur yang ingin dijalankan dalam pelayanan pemakaman, perancangan pembangunan informasi, pengujian sistem informasi pelayanan pemakaman, dan implementasi sistem informasi terhadap pemakaman yang ingin di usulkan.</p>
----	---	--	-------------------	--	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan fokus penelitian pada lahan pemakaman umum yang berada di Kota Makassar milik pemerintah. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2022.

B. Jenis dan Sumber Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggambarkan dan menjabarkan tentang fenomena sosial yang diangkat dalam suatu penelitian. Sehingga dengan mengklasifikasi dan mencari seluas-luasnya tentang fenomena sosial.

Pendekatan dari penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dimana dipergunakan berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian ini.

2. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data-data yang di peroleh secara langsung dari sumber- sumber, pihak-pihak yang menjadi objek dari penelitian ini antara

lain data yang didapat langsung dari pengamatan dan wawancara langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsipan atau dokumen-dokumen yang terdapat di instansi-instansi di Kota Makassar yang terkait seperti Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pusat Statistik.

C. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Observasi, berfungsi untuk pencarian data dengan mengidentifikasi data melalui pengukuran serta pengambilan data secara langsung lapangan. Kegiatan observasi dilakukan secara sistematis untuk menjajaki masalah dalam penelitian serta bersifat eksplorasi. Observasi dilakukan berupa pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap kondisi eksisting lahan pemakaman umum dengan melakukan pemetaan tematik lokasi.

2. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi tentang jumlah jenazah yang dimakamkan didalam Kota Makassar. Wawancara dilakukan terhadap supir mobil jenazah.

3. Metode instansional, yaitu salah satu teknik pengumpulan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif objek penelitian.

4. Kepustakaan (*library research*) adalah cara pengumpulan data dan informasi melalui literatur/referensi, laporan penelitian serupa, dan bahan seminar atau jurnal yang terkait dengan studi yang akan dilakukan.

5. Studi dokumentasi, untuk melengkapi data maka diperlukan informasi dari dokumentasi yang berhubungan dengan objek yang menjadi studi.

D. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti atas semua kasus individu dan gejala yang ada di daerah penelitian (Sumaatmadja, 1988; 112).

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang mewakili populasi yang bersangkutan (Sumaatmadja, 1988 :12). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu :

a. Sampling Area

Sampling Area adalah teknik pengambilan subjek yang diambil di suatu area yang memiliki populasi. Teknik ini juga sering di sebut sama,

mirip karena sesame mengambil penelitian subjek suatu populasi, kelompok. Namun Sampling area ini berfokuskan untuk penduduk Kota Makassar.

b. Purposive Sampling

Purposive sampling adalah penelitian memilih informan atau narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data-data yang tebal. Namun pada Purposive sampling ini digunakan data tentang angka kematian.

E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sudaryono, 2017). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Identifikasi sebaran lahan pemakaman di Kota Makassar.

1. Kriteria Pemakaman

1. Sebaran
2. Kapasitas
3. Luasan

2. Proyeksi daya tampung kebutuhan pemakaman 20 tahun kedepan

1. Tempat Pemakaman Umum

2. Pertumbuhan Penduduk
3. Angka kematian (Mortalitas)
3. Arah pengembangan pemakaman di Kota Makassar
 1. Peruntukan Makam untuk masyarakat di Kota Makassar
 2. Pengoptimalisasian lahan Pemakaman
 3. Sistem penumpukan Makam

F. Metode Pengelohan dan Analisis Data

Dalam metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Nanang Martono (2015) dalam Sudaryono (2017) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka teknik analisis yang digunakan adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Tujuan deskriptif ini adalah

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki sehingga yang sangat perlu adalah kekuatan data.

2. Analisis Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk di masa mendatang, tetapi merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi tertentu dari variabel pertumbuhan penduduk yakni kelahiran, kematian dan migrasi. Ketiga komponen variabel inilah yang menentukan besarnya penduduk dan karakteristiknya di masa mendatang (Mantra, 2000 dalam Muta'ali, 2015).

Untuk menghitung pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk di Kota Makassar maka digunakan Metode Extrapolasi yang menurut Tarigan (2012), merupakan kecenderungan pertumbuhan penduduk di masa lalu dan melanjutkan kecenderungan tersebut untuk masa yang akan datang sebagai proyeksi. Rumus proyeksi tersebut adalah :

$$P_t = P_o + f (t-o)$$

Keterangan :

P_t = penduduk pada tahun t

P_o = penduduk pada tahun dasar

$(t-o)$ = selisih antara tahun dasar dengan tahun yang diramalkan, yang sering disingkat dengan n

f = fungsi perkembangan penduduk

Apabila trend masa lalu mendekati garis lurus maka $f(t-o)$ berubah menjadi $b(t-o)$ dan rumus keseluruhan menjadi

$$P_t = P_o + b(t-o)$$

dimana :

b = rata-rata tambahan jumlah penduduk tiap tahun pada masa lampau sampai sekarang (tahun dasar proyeksi) Apabila trend masa lalu adalah garis lengkung yang menaik, rumusnya berubah menjadi

$$P_t = P_o (1+r)^{(t-o)}$$

dimana :

r = rata-rata proporsi kenaikan penduduk setiap tahun, yaitu jumlah kenaikan/pertambahan penduduk dibagi jumlah penduduk pada tahun dasar (tahun sebelumnya). Rumus tersebut sering disingkat menjadi

$$P_t = P_o (1+r)^n$$

3. Analisis Daya Tampung sebagai Ambang Batas Lahan Pemakaman

Analisis daya tampung dijadikan sebagai analisis untuk mengetahui ambang batas lahan pemakaman di Kota Makassar dengan menghitung luasan fungsi lahan pemakaman yang akan dibagi dengan luasan setiap makam sesuai dengan rumus yang dikemukakan oleh Yaeates (1980) dalam Muta'ali (2012) sebagai berikut :

$$P_n = P_0 e^{r \cdot n}$$

Keterangan:

P_n = Jumlah penduduk setelah n tahun ke depan.

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun awal.

r = Angka pertumbuhan penduduk.

n = Jangka waktu dalam tahun.

e = Bilangan eksponensial = 2,7182818.

4. Analisis SWOT

Menjawab rumusan masalah ketiga digunakan Analisis SWOT untuk menentukan arahan atau strategi terkait pengembangan pemukiman di Kota Makassar. Adapun penjelasan terkait Analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut:

a. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis yang digunakan untuk melakukan analisis strategis. SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan-kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan-kelemahan), *Opportunities* (peluang-peluang), *Threats* (ancaman-ancaman). Pengertian analisis SWOT dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut:

- Kekuatan (*Strength*)

Menurut **Amin W.T**, kekuatan ialah sumber daya atau keterampilan lain yang mampu bersaing dalam kebutuhan pasar suatu perusahaan.

- **Kelemahan (*Weaknesses*)**

Menurut **Amin W.T**, kelemahan ialah kekurangan dalam keterampilan dan kemampuan yang dapat menghalangi kinerja efektif.

- **Peluang (*Opportunities*)**

Menurut **Amin W.T**, peluang ialah kecenderungan utama yang bisa menguntungkan.

- **Ancaman (*Threats*)**

Menurut **Amin W.T**, ancaman ialah kecenderungan yang tidak menguntungkan.

b. Cara Membuat Personal Analisis SWOT

- Menentukan indikator-indikator kekuatan, caranya adalah dengan mengidentifikasi semua indikator yang dapat kita kendalikan. Semua indikator yang mendukung tujuannya merupakan indikator-indikator kekuatan. Sebaliknya, indikator yang menghambat atau mengganggu tujuan merupakan indikator kelemahan.
- Menentukan indikator-indikator kelemahan, tujuan menentukan indikator ini adalah untuk meningkatkan kinerja.
- Menentukan indikator-indikator peluang.
- Menentukan indikator ancaman. Tentukan faktor-faktor apa saja yang dianggap dapat mengancam.

c. Model Penentuan Indikator Komponen SWOT

Tabel 3. 1 Model Penentuan Indikator Komponen SWOT

INTERNAL	Kekuatan yang dimiliki	Kelemahan yang dimiliki
EKSTERNAL	Peluang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang	Ancaman yang memungkinkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlaksana

Penentuan indikator tersebut disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Selanjutnya lakukan evaluasi terhadap faktor internal, yaitu semua kekuatan lakukan evaluasi terhadap faktor internal, yaitu semua kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Penentuan indikator peluang dan ancaman disusun berdasarkan tujuan kita dalam membuat analisis SWOT.

d. Membuat Strategi SO, WO, ST, dan WT

Setelah masing-masing indikator SWOT ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat formulasi strategi dengan menggabungkan S dengan O, W dengan O, S dengan T, dan W dengan T. Cara ini dilakukan sesuai dengan tujuan kita melakukan analisis SWOT.

Sebelum melakukan pilihan strategi, kita perlu mengetahui pengertian masing-masing kuadran dari hasil penggabungan, yaitu SO strategi, WO strategi, ST strategi, dan WT strategi

- **Kuadran S-O** : Strategi yang menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut peluang;

- **Kuadran W-O** : Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk merebut peluang. Artinya banyak peluang yang dapat diraih, tetapi tidak ditunjang dengan kekuatan yang memadai (lebih banyak kelemahannya) sehingga kelemahan tersebut perlu diminimalisasi terlebih dahulu;
- **Kuadran S-T** : Strategi yang disusun dengan menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan terjadi;
- **Kuadran W-T** : Strategi yang disusun dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

e. Model Analisis SWOT

Beberapa penyesuaian dalam pembentukan model analisis SWOT, yaitu pembobotan tetap menggunakan skala 1 (sangat penting) hingga 0 (tidak penting), akan tetapi penentuan nilai skala untuk masing-masing situasi total berjumlah 1 dengan cara:

- Urutkan faktor situasi berdasarkan skala prioritas (SP) (tertinggi nilainya 16 dari 4×4 , urutan 2 nilainya $3 \times 4 = 12$, urutan ke 3 nilainya $2 \times 4 = 8$ dan terendah nilai dari 4 dari 1×4) lalu dikalikan dengan konstanta (K) nilai tertinggi yaitu 4;
- Peringkat tetap menggunakan skala 1 (rendah) sampai 4 (tinggi) untuk Kekuatan dan Peluang. Sedangkan skala 4 (rendah) sampai 1 (tinggi) untuk Kelemahan dan Ancaman. Namun jika tidak ada pembandingan,

maka nilai skala ditentukan berdasarkan prioritas dari masing-masing situasi (misalnya skala 4 untuk peluang yang paling tinggi);

- Nilai tertinggi untuk bobot dikali peringkat adalah 1 sampai 2 (kuat) dan terendah adalah 0 sampai 1 (lemah).
- Jumlah total tiap-tiap bobot, baik bobot IFAS maupun bobot EFAS akan diskalakan dengan menggunakan range skala:
 - 3,11 – 4 = Sangat Kuat
 - 2,11 – 3 = Kuat
 - 1,11 – 2 = Rata-rata
 - 0 – 1 = Lemah

Hasil rancangan SWOT tersebut akan dirembukkan bersama dengan berbagai *Stake Holder* yang terdiri atas berbagai eksponen sebanyak 5 orang (jumlah ganjil) dengan harapan ketika dilakukan *Voting* (suara terbanyak) untuk menetapkan suatu keputusan, maka diharapkan akan lahir sebuah keputusan dengan jumlah suara yang terbanyak, yang terdiri atas :

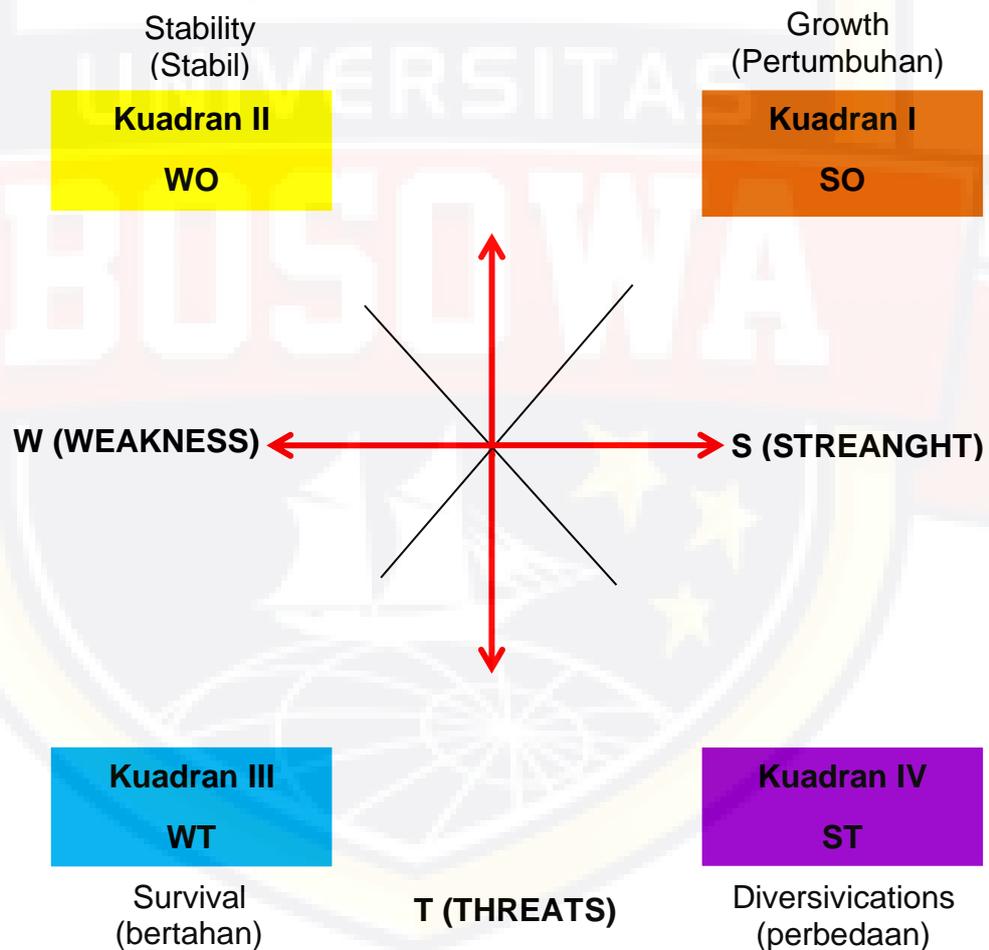
- Akademisi 2 Orang
- Eksponen pemerintahan (praktisi) 1 Orang
- Lembaga Swadaya Masyarakat 1 Orang
- Warga 1 Orang

Yang terhimpun dengan cara mendatangi satu per satu *Stake Holder* tersebut dan berdiskusi, meminta tanggapan terhadap Skala Prioritas dan

Rating yang telah peneliti cantumkan pada matriks nilai skor EFAS dan IFAS nya.

Kesimpulan:

1. Penentuan titik koordinat X, (IFAS) hasil
KEKUATAN – KELEMAHAN
2. Penentuan titik koordinat Y, (EFAS) hasil
PELUANG – ANCAMAN



Gambar 3. 1 Kuadran SWOT

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Dalam definisi operasional ini ada beberapa pengertian dan batasan yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan yaitu :

1. Lahan Pemakaman umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lahan pemakaman umum milik pemerintah Kota Makassar.
2. Ambang batas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batas kemampuan lahan pemakaman untuk menampung mayat.
3. Penduduk berdasarkan penguburan dalam penelitian ini adalah jumlah jenazah yang dimakamkan di Kota Makassar.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar

Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi dengan cakupan wilayah merupakan wilayah pesisir dan bahkan mempunyai 5 pulau dimana terdapat di kelurahan yang berada di pulau. Selain itu, Kota Makassar juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut.

1. Letak Geografis dan Administrasi

Secara astronomis, Kota Makassar terletak antara $119^{\circ} 24' 17'' 28''$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 8' 6'' 19''$ Lintang Selatan sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar tercatat memiliki luas wilayah 175,77 km persegi yang meliputi 15 kecamatan dan terbagi dalam 153 kelurahan Kecamatan terluas di Kota Makassar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan Luas 48,22 km persegi atau mencakup 27,43 persen dari luas kota makassar secara keseluruhan. Sedangkan, Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan luas 1,54km persegi atau hanya sebesar 0,88 persen dari luas Kota Makassar. Kota Makassar terdiri dari 996 RW dengan Kecamatan Tallo Merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yakni 15 kelurahan sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebanyak 3 kelurahan. Namun, untuk lebih jelasnya mengenai jumlah Kelurahan dan RW di Kota Makassar Menurut Kecamatan dapat diketahui melalui table berikut:

Tabel 4. 1 Pembagian Kelurahan dan RW Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelurahan	RW
1	2	3	4
1	Mariso	9	47
2	Mamajang	13	56
3	Tamalate	11	113
4	Rappocini	11	107
5	Makassar	14	69
6	Ujung Pandang	10	37
7	Wajo	8	45
8	Bontoala	12	56
9	Ujung Tanah	9	35
10	Kep. Sangkarrang	3	15
11	Tallo	15	77
12	Panakkukang	11	90
13	Manggala	8	70
14	Biringkanaya	11	111
15	Tamalanrea	8	68
Kota Makassar		153	996

Sumber : BPS Kota Makassar dalam Angka Tahun 2021

2. Aspek Kependudukan di Kota Makassar

Penduduk Kota Makassar berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa jumlah penduduk untuk 5 tahun terakhir ini yakni dari tahun 2017-2021 naik turun setiap tahunnya. Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan banyaknya penduduk perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan selisih 5.607 jiwa.

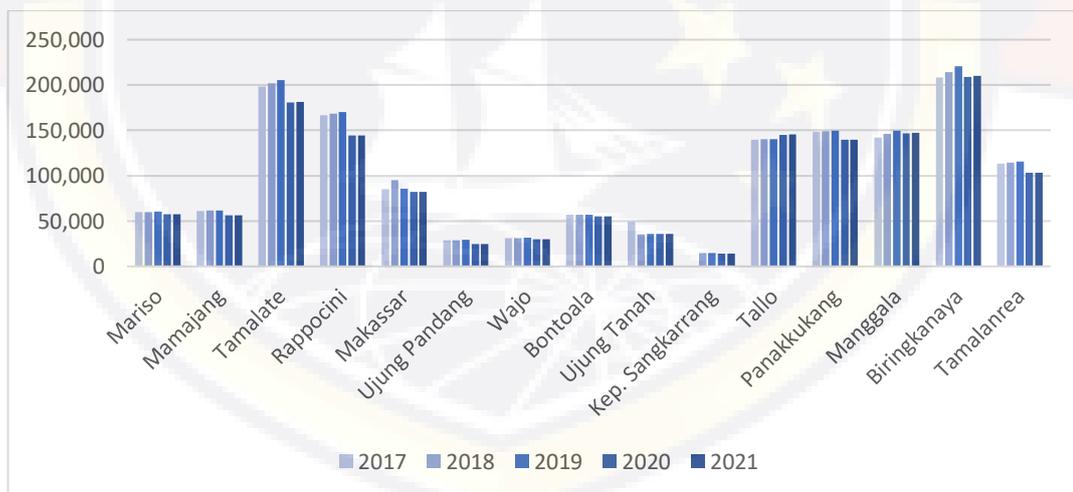
a. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Jumlah penduduk di Kota Makassar untuk setiap tahunnya naik turun seperti yang tercatat di data jumlah penduduk dari tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di tahun 2017 sebesar 1.489.011 jiwa hingga di tahun-tahun 2021 sebesar 1.427.619 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai data perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2017-2021 menurut kecamatan dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 4. 2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Makassar dari Tahun 2017-2021 Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Mariso	59,721	60,130	60,499	57,426	57,594
2	Mamajang	61,186	61,338	61,452	56,049	56,056
3	Tamalate	198,210	201,908	205,541	180,824	181,533
4	Rappocini	166,480	168,345	170,121	144,587	144,619
5	Makassar	85,052	95,311	85,515	82,067	82,142
6	Ujung Pandang	28,696	28,883	29,054	24,526	24,526
7	Wajo	31,121	31,297	31,453	29,972	30,033
8	Bontoala	56,784	57,009	57,197	54,996	55,102
9	Ujung Tanah	49,528	35,354	35,534	35,789	35,947
10	Kep. Sangkarrang	0	14,458	14,531	14,125	14,187
11	Tallo	139,624	140,023	140,330	144,977	145,400
12	Panakkukang	148,482	149,121	149,664	139,590	139,635
13	Manggala	142,252	145,873	149,487	146,724	147,549
14	Biringkanaya	208,436	214,432	220,456	209,048	210,076
15	Tamalanrea	113,439	114,672	115,843	103,177	103,220
Kota Makassar		1,489,011	1,508,154	1,526,677	1,423,877	1,427,619

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 2021



Gambar 4. 1 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Makassar di Tahun 2017-2021 Menurut Kecamatan

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

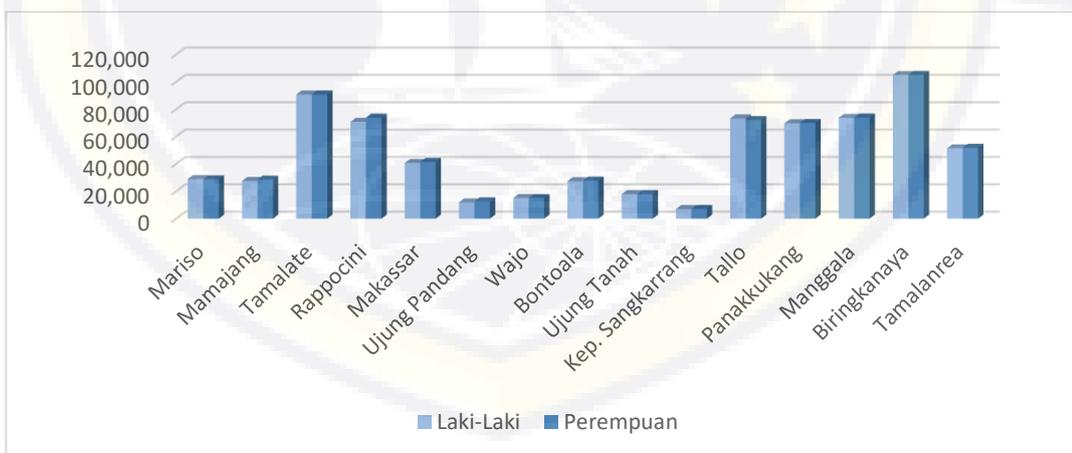
Pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dalam satu wilayah tertentu. Adapun ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (rasio jenis kelamin) dapat mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk.

Kota Makassar memiliki jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki selama 5 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Makassar dapat kita lihat melalui table berikut :

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	2	3	4	5
1	Mariso	28,903	28,691	57,594
2	Mamajang	27,520	28,536	56,056
3	Tamalate	90,757	90,776	181,533
4	Rappocini	70,802	73,817	144,619
5	Makassar	40,699	41,443	82,142
6	Ujung Pandang	11,895	12,631	24,526
7	Wajo	15,002	15,031	30,033
8	Bontoala	27,339	27,763	55,102
9	Ujung Tanah	17,995	17,952	35,947
10	Kep. Sangkarrang	7,051	7,136	14,187
11	Tallo	73,289	72,111	145,400
12	Panakkukang	69,693	69,942	139,635
13	Manggala	73,649	73,900	147,549
14	Biringkanaya	104,997	105,079	210,076
15	Tamalanrea	51,415	51,805	103,220
Kota Makassar		711,006	716,613	1,427,619
Tahun 2020		709,060	714,817	1,423,877
Tahun 2019		755,968	770,709	1,526,677
Tahun 2018		746,951	761,203	1,508,154
Tahun 2017		737,146	751,865	1,489,011

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 2022



Gambar 4. 2 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2021

c. Perkembangan Jumlah Kematian

Kematian atau sering biasa di sebut dengan Mortalitas merupakan satu dari tiga komponen yang mempengaruhi struktur dan jumlah penduduk di suatu wilayah. Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, akan tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Perkembangan jumlah kematian di Kota Makassar selama lima tahun terakhir ini semakin meningkat setiap tahunnya yakni dari tahun 2017-2021. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah kematian selama lima tahun terakhir dapat kita ketahui melalui tabel berikut:

Tabel 4. 4 Perkembangan Jumlah Kematian di Kota Makassar dari Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Kematian (Jiwa)
1	2	3
1	2017	3,422
2	2018	3,392
3	2019	3,837
4	2020	4,572
5	2021	5,030

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar,2022



Gambar 4. 3 Grafik Perkembangan Jumlah Kematian di Kota Makassar 2021

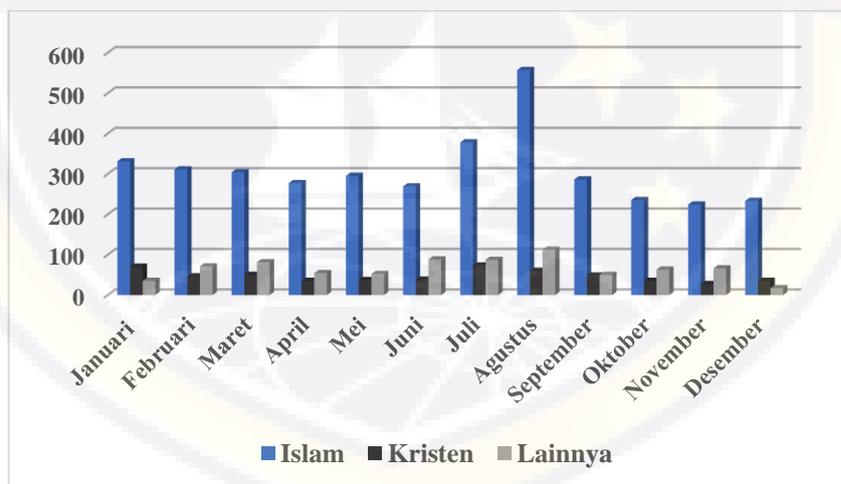
d. Jumlah Kematian Menurut Agama dan Bulan

Kota Makassar Memiliki beberapa klasifikasi penduduk seperti berdasarkan jumlah kematiannya yang kemudian dibedakan lagi berdasarkan agama dan bulannya. Jumlah kematian terbanyak menurut agama terdapat di kelompok agama islam sebanyak 3.700 jiwa dengan total kematian terbanyak terdapat di bulan Agustus 2021 sebanyak 729 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kematian perbulan di Kota Makassar dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. 5 Jumlah Kematian Menurut Agama dan Bulan di Kota Makassar Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kematian (Jiwa)			Jumlah (Jiwa)
		Islam	Kristen	Lainnya	
1	2	3	4	5	6
1	Januari	331	70	35	436
2	Februari	311	46	71	428
3	Maret	304	50	81	435
4	April	277	35	54	366
5	Mei	295	37	52	384
6	Juni	269	38	88	395
7	Juli	378	73	87	538
8	Agustus	557	60	112	729
9	September	286	48	50	384
10	Oktober	235	35	63	333
11	November	224	27	66	317
12	Desember	233	35	17	285
Kota Makassar		3,700	554	776	5,030
2020		3,427	538	607	4,572
2019		2,815	502	520	3,837
2018		2,700	439	253	3,392
2017		2,680	475	267	3,422

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021



Gambar 4. 4 Grafik Jumlah Kematian Menurut Agama dan Bulan di Kota Makassar Tahun 2021

B. Perbandingan Persentasi Pertumbuhan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Kematian

Perkembangan penduduk merupakan perubahan baik penambahan maupun penurunannya. Istilah lain yang sering disamakan dengan pertumbuhan penduduk yaitu penambahan penduduk. Perbedaannya adalah untuk penambahan penduduk besarnya dinyatakan dengan angka tertentu sedangkan pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam persen.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Makassar menunjukkan persentase pertumbuhan naik turun dari tahun 2017-2021 dengan pertumbuhan penduduk rata-rata hanya 0,25% yakni sebanyak 36.052 jiwa sedangkan untuk persentase pertumbuhan jumlah kematian di Kota Makassar juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 0,25% yakni sebanyak 667 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya dari jumlah penduduk sebanyak 36.052 jiwa sedangkan kematian 667 jiwa/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel berikut :

**Tabel 4. 6 Perbandingan Persentase Pertumbuhan Jumlah Penduduk
dengan Jumlah Kematian di Kota Makassar**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertambahan dan Penurunan (Jiwa)	%	Jumlah Kematian (Jiwa)	Pertambahan dan Penurunan (Jiwa)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2017	1,489,011	-	-	3,422	-	-
2	2018	1,508,154	19,143	0.13	3,392	30	0.02
3	2019	1,526,677	18,523	0.13	3,837	445	0.27
4	2020	1,423,877	102,800	0.71	4,572	735	0.44
5	2021	1,427,619	3,742	0.03	5,030	458	0.27
Jumlah		7,375,338	144,208	1.00	20,253	1,668	1.00
Rata-Rata		1,475,068	36,052	0.25	4,051	667	0.25

Sumber : Hasil Analisis, 2022

C. Identifikasi Pemakaman Umum Milik Pemerintah di Kota Makassar

Kota Makassar memiliki banyak tempat pemakaman namun ada yang bersifat umum dan Khusus, misalnya seperti Taman Makam Pahlawan, Makam Berdasarkan Agama ataupun Milik Keluarga Sendiri, Namun pemakaman umum untuk masyarakat yang dimiliki pemerintah hanya beberapa di Kota Makassar yang tersebar di beberapa kecamatan dan kelurahan.

1. Sebaran Tempat Pemakaman Umum di Kota Makassar

Tempat pemakaman umum yang berada di Kota Makassar terdapat 7 lokasi pemakaman yang dikelola oleh pemerintah Kota Makassar yakni TPU Islam Dadi, TPU Islam Beroanging, TPU Islam Paropo, TPU Islam Maccini, TPU Islam Sudiang Raya, TPU Kristen Panaikang dan TPU Kristen Pannara dengan lokasi TPU masing-masing berbeda. Adapun penjelasan

setiap lokasi TPU berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui melalui penjelasan berikut :

a. TPU Islam Dadi

Pemakaman Islam Dadi terdapat di Kelurahan Mariccayya Selatan, Kecamatan Mamajang yang dibuka sejak zaman belanda kemudian ditutup di tahun 1998 dengan luas lahan 33.148 m². Penutupan TPU Islam Dadi dilakukan karena pemakaman TPU Islam Sudiang Raya saat itu telah di buka dan apabila pemakaman-pemakaman didalam Kota seperti TPU Islam Dadi tidak ditutup maka masyarakat akan tetap memilih menguburkan kelurga mereka di TPU dalam Kota dibandingkan di TPU Sudiang Raya Karena Lokasi yang jauh. Pada tanggal 12 Desember 2005, pemerintah menyatakan bahwa TPU Islam Dadi di buka Kembali dengan sistem penumpukan makam bagi mereka yang mempunyai keluarga dalam TPU tersebut. Orang-orang yang di makamkan di dalam TPU ini terdapat dari beberapa daerah seperti dari Jawa, Madura, Enrekang, Maros, Bone, dan Selayar namun kebanyakan berasal dari Makassar. Dipemakaman ini terdapat 7 blok yakni dari A-G bertujuan untuk memudahkan mencari makam. Untuk setiap blok dirata-ratakan memiliki jumlah makam 3.500 petak sehingga total makam dalam TPU ini sekitar 24.500 petak untuk tahun 2018 Sedangkan untuk tahun 2022 ini tidak dapat terhitung jumlahnya karena masing- masing petak sudah ada yang di tumpuk 2 sampai 3 dalam satu petak.



Gambar 4. 5 TPU Islam Dadi

b. TPU Islam Beroanging

Pemakaman Islam Beroanging memiliki luas lahan 45.976 m² yang terdapat di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo yang dibuka sejak zaman Belanda. Kemudian ditahun 1996 ditutup karena telah penuh dan dibuka Kembali ditahun 2005 dengan sistem penumpukan makam bagi mereka yang memiliki keluarga yang terdapat dalam TPU tersebut. Orang-orang yang telah dimakamkan dalam TPU ini terdapat dari beberapa daerah seperti Jawa, Gowa, dan Lain-lain namun kebanyakan berasal dari Kota Makassar. Pemakaman di TPU Islam Beroanging dibagi perblok dengan jumlah 10 blok yakni dari A-J bertujuan untuk memudahkan mencari makam. Untuk setiap Blok dirata-ratakan memiliki jumlah makam 3.000

petak sehingga total makam dalam TPU ini sekitar 30.000 petak untuk tahun 2018. Sedangkan untuk di tahun 2022 ini tidak dapat terhitung keseluruhannya karena sudah terjadi penumpukan makam 2 sampai 3 dalam satu petak.



Gambar 4. 6 TPU Islam Beroangin

c. TPU Islam Paropo

Pemakaman Islam Paropo memiliki luas lahan 58.500 m² yang terdapat di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang dan dibuka sejak tahun 1958 hingga tahun 1985 telah penuh. Namun karena permintaan masyarakat di tahun 1985-1998 ingin menumpuk antar keluarga mereka sehingga dibuka Kembali dengan sistem tumpuk. Akan tetapi menurut Mandor di TPU Islam Paropo di bulan Oktober 1998 ditutup Kembali kecuali untuk dua orang yakni Andi Muhammad Jusuf Amir yang dikenal dengan

Jenderal M.Yusuf (Panglima Para Prajurit dan A.A Rifai (Mantan Gubernur Pertama Sulawesi Selatan) berdasarkan SK.

Banyak keluhan dari masyarakat seperti mahalnya biaya pemakam di pihak swasta dan biaya memulangkan mayat ke kampung halaman menyebabkan TPU ini Kembali dibuka di tahun 2005 sampai sekarang dengan sistem penumpukan bagi yang memiliki hubungan keluarga dalam TPU tersebut. Orang yang telah dimakamkan dalam TPU ini Terdapat dari beberapa daerah seperti Jawa, Manado, Gorontalo dan Hampir untuk semua Kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, Namun TPU ini tetap diprioritaskan untuk masyarakat di Kota Makassar. TPU Islam Paropo dibagi perblok dengan jumlah 18 blok yakni terdapat blok LL, D, E, K, Z, AB, DD, BB, AAC, X, AAB V, T, J, P, N, dan M dengan setiap blok dirata-ratakan memiliki jumlah makam 500 petak sehingga total makam dalam TPU ini sekitar 9.000 petak di tahun 2018. Sedangkan di untuk total petak di tahun 2022 ini tidak dapat terhitung karena sudah terjadi penumpukan 2 sampai 5 satu petak.





Gambar 4. 7 TPU Islam Paropo

d. TPU Islam Maccini

Pemakaman Islam Maccini terdapat di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar dengan luas lahan sebesar 18.758 m² yang di buka sejak zaman belanda kemudian di tutup ditahun 1967 karena telah penuh. Hingga saat ini , TPU Islam Maccini belum dibuka Kembali dan tidak di fungsikan lagi layaknya pemakaman karena Kondisi pemakaman dalam TPU ini tidak terawat, berair dan kotor dan jumlah petak diperkirakan telah mencapai ribuan dengan kondisi setiap makan telah dilakukan penumpukan .





Gambar 4. 8 TPU Islam Maccini

e. TPU Islam Sudiang Raya

Pemakaman Islam Sudiang Raya Memiliki luas lahan sebesar 125.000 m² yang terdapat di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya dan dibuka pada tanggal 6 bulan juni tahun 1998 dan masih aktif saat ini. Pemakaman ini merupakan makam baru namun terdapat juga beberapa makam yang di tumpuk.

Pemakaman di TPU Islam Dadi dibagi perblok dengan jumlah 54 blok yakni dari A-g sebanyak 26 blok, A1-A6 sebanyak 3 blok, AB-BB sebanyak 2 Blok, AA-AQ sebanyak 17 blok sehingga total blok sebanyak 54 dengan rata-rata jumlah makam setiap blok rata-rata 300 petak, dengan demikian total makam dalam TPU ini sebanyak 16.200 petak. Orang-orang yang telah dimakamkan dalam TPU kebanyakan adalah masyarakat yang domisili makassar namun ada pula yang dari luar kota seperti maros.



Gambar 4. 9 TPU Islam Sudiang Raya

f. TPU Kristen Panaikang

Pemakaman Kristen Panaikang memiliki luas lahan sebesar 51.500 m² yang terdapat di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang dan dibuka sejak tahun 1949 sampai sekarang tetapi dengan sistem penumpukan pemakaman.

Pemakaman Kristen Panaikang dibagi perblok dengan jumlah 19 blok dari blok A sampai S yang dimana pada setiap bloknya tidak merata jumlahnya ada yang setiap bloknya 300 petak dan ada jga lebih dari 300 petak itu dikarenakan pada sistem sebelumnya banyak keluarga yang ingin di satukan atau di dekatkan kuburannya dengan keluarganya jadi untuk

jumlah keseluruhan jumlah total petak di TPU Kristen Panaikang tidak dapat di tentukan dikarenakan sudah banyak yang tertumpuk 2-3 permakam atau petak.



Gambar 4. 10 TPU Kristen Panaikang

g. TPU Kristen Pannara

Pemakaman Kristen Pannara dibagi perblok dengan jumlah 9 blok yakni dari blok A sampai G yang dimana perbloknya tidak merata jumlahnya dan ada juga blok untuk kuburan anak-anak yang di bagi 2 blok yaitu blok CC dan DD yang jumlah setiap bloknya pun tidak merata dengan demikian total keseluruhan jumlah petak di pemakan Kristen Pannara yaitu 6,987 petak tetapi sudah ada petak yang ditumpuk beberapa tumpukan.



Gambar 4. 11 TPU Kristen Pannara

2. Kondisi Tempat Pemakaman Umum di Kota Makassar

Tempat pemakaman umum milik pemerintah adalah sarana yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk pemakaman kepada penduduk kota dan penduduk luar Kota Makassar. Secara umumnya, Setiap makam di sediakan tempat dengan ukuran maksimal panjang 2,5 meter, lebar 1,5 meter dan dengan kedalaman minimal 1,5 meter dari permukaan tanah namun kondisi di Kota Makassar menggunakan maksimal panjang 2 meter, lebar 1 meter dan minimal 1 meter.

Secara umumnya, kondisi tempat pemakaman umum di Kota Makassar dapat ditinjau dari berbagai aspek:

a. Luasan Lahan Makam

Kota Makassar Memiliki 7 TPU milik pemerintah dengan total luas lahan sebanyak 367.452 m² atau 36,71 ha. Dari ke-7 lokasi TPU yang di memiliki pemerintah terdapat 5 lokasi yang telah penuh yaitu TPU Islam Dadi, TPU Islam Beroanging, TPU Islam Paropo, TPU Kristen Panaikang, dan TPU Kristen Pannara tapi masih digunakan dengan system tumpuk sedangkan untuk TPU Islam Maccini juga telah penuh namun saat ini tidak digunakan karena berada dalam tahap pemeliharaan.

Lokasi pemakaman yang masih memiliki lahan kosong yaitu TPU Islam Sudiang Raya dengan sisa lahan sebanyak 0.33 ha. meski terdapat lahan kosong tetapi dalam TPU ini juga terdapat makam yang telah di tumpuk yakni mereka yang merupakan pasangan suami istri atau pun keluarga.

b. Sistem Penumpukan

Kurangnya lahan pemakaman di Kota Makassar meyebabkan terjadinya system penumpukan mayat. Namun penumpukan ini dilakukan untuk mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan selang waktu kematian minimal 5 tahun untuk dapat digali Kembali sedangkan Batasan maksimal mayat dalam satu makam tidak ada namun diperkirakan dalam satu makam hanya mampu menampung 3 mayat.

Hasil wawancara dengan para mandor dan pengawas di setiap TPU menjelaskan bahwa system tumpuk di lapangan terdapat 2 cara yang berbeda yakni :

1. Sistem Tumpuk Susun

Sistem Penumpukan ini dilakukan dengan cara menggali makam, kemudian mayat pertama yang tersisa tulang-belulanganya dipindahkan kebagian bawah dengan kedalaman 50 cm. Sedangkan bagi makam yang telah terdapat 2 mayat maka tulang belulang tersebut tetap dikumpul dan disatukan untuk dipindahkan kebagian bawah kemudian ditutup Kembali sehingga dibagian atasnya akan diletakkan mayat yang baru dengan kedalaman 1 meter dari permukaan tanah setelah mayat yang lama.

2. Sistem Tumpuk Berdampangan

Sistem penumpukan ini dilakukan dengan cara membuat liang lahad dibagian sampingnya kemudian jika terdapat anggota keluarga yang ingin dimakamkan lagi maka makam tersebut dibongkar dan akan dibuatkan liang lahad lagi dibagian samping mayat sebelumnya sehingga tulang-belulang mayat sebelumnya tidak akan terganggu. Sistem ini juga berfungsi untuk menghindari longsor.

c. Pola Penataan Makam

Setiap TPU memiliki pembagian perblok yang berguna untuk memudahkan Ketika mencari makam. Dalam blok tersebut terdapat makam perempuan dan laki-laki terdapat 1 nisan sedangkan perempuan terdapat 2 nisan.

Ketidak teraturan makam terdapat di 6 lokasi TPU Islam seperti dadi, Beroanging, Paropo, Maccini, Panaikang, dan Pannara yang disebabkan karena tidak adanya jarak antar makam, ukuran makam dan bentuk makam yang berbeda-beda. Sedangkan untuk TPU Islam Sudiang Raya masih terlihat teratur namun terdapat pula makam yang tidak memiliki jarak dengan makam lainnya disebabkan adanya renovasi makam seperti menembok sehingga luasan makam akan bertambah dengan mengambil lahan yang sebelumnya disediakan sebagai jarak antar makam.

d. Aktivitas di Makam

Aktivitas didalam TPU milik pemerintah tidak hanya terdapat makam tetapi juga terdapat aktivitas lain yang dilakukan oleh masyarakat sekitar TPU seperti menjemur pakaian di bagian pagar makam, tidur di atas makam yang telah direnovasi, makam dan minum disekitaran makam, menidurkan bayi mereka diatas makam dengan membuat ayunan di atas makam yang memiliki pagar, berjualan didalam makam, tempat bermain anak-anak (main bola) dan tempat berkumpul masyarakat sekitar TPU. Berikut dokumentasi aktivitas yang terdapat didalam TPU:

Tabel 4. 7 Dokumentasi Aktivitas di TPU Milik Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022

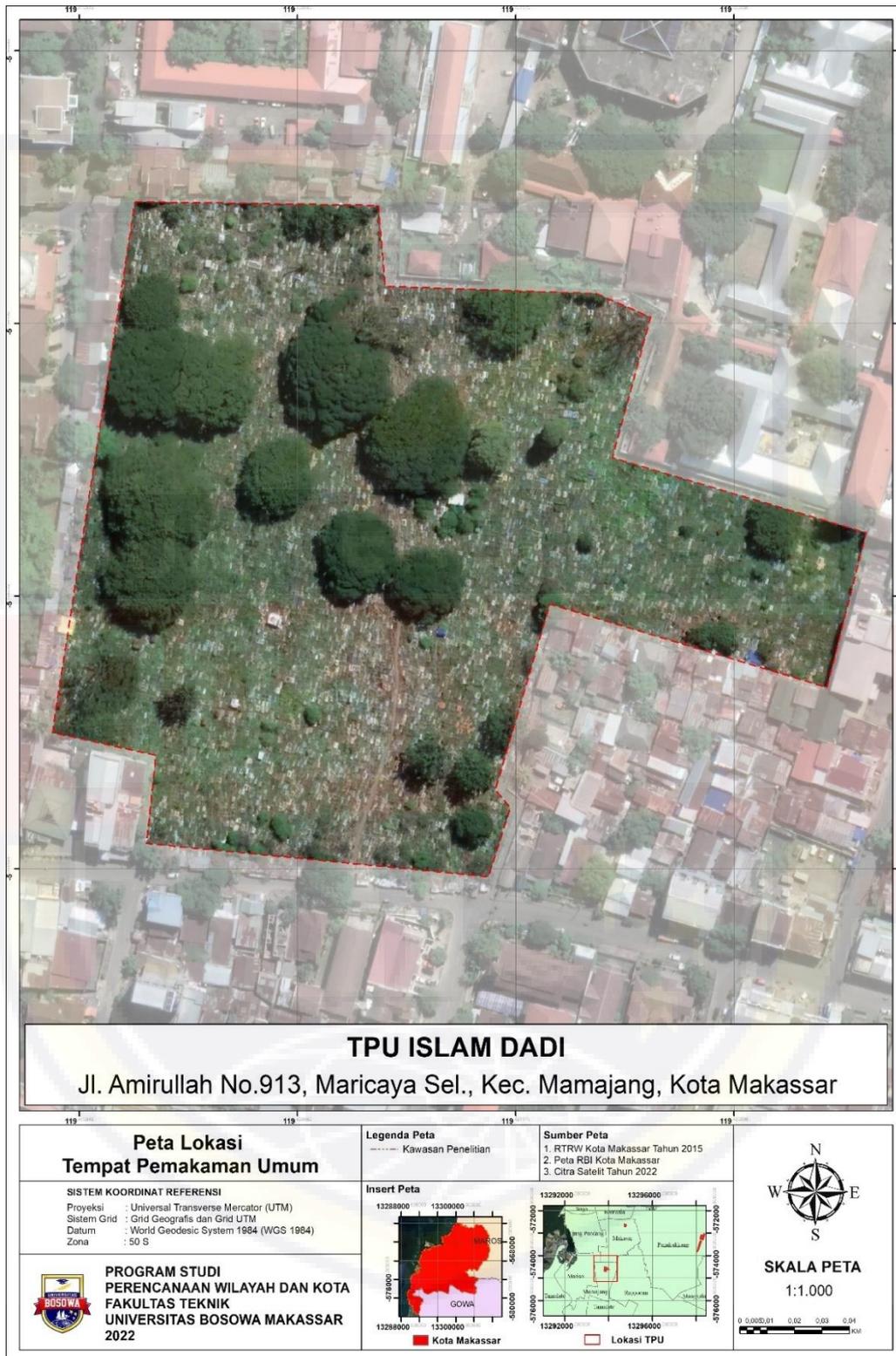
No	Aktivitas	Lokasi	Dokumentasi
1.	Bermain	TPU Islam Sudiang Dadi	
2	Menjemur	TPU Islam Sudiang Dadi	
3.	Bermain	TPU Islam Beroanging	

4.	Berjalan	TPU Islam Beroanging	
5.	Tempat Berkumpul	TPU Islam Beroanging	
6.	Tempat Berkumpul	TPU Islam Paropo	
7.	Tempat Berkumpul	TPU Islam Maccini	

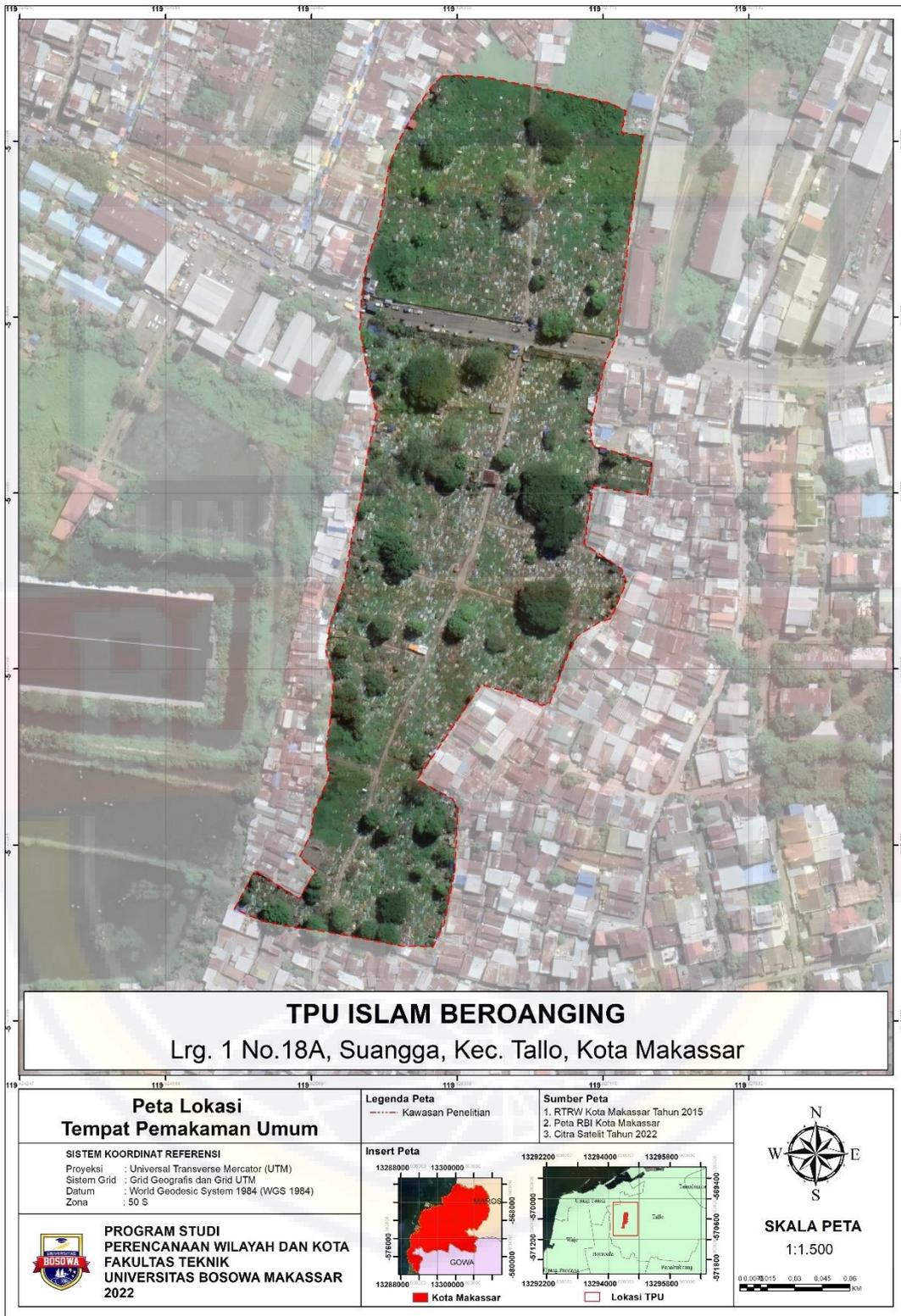
8.	Bermain	TPU Islam Maccini	
9.	Tempat Berjualan	TPU Islam Sudiang Raya	
10.	Tempat Bermain	TPU Islam Sudiang Raya	
11.	Tempat Berjualan	TPU Islam Sudiang Raya	

12.	Tempat Berjualan	TPU Kristen Panaikang	
13.	Tempat Berkumpul	TPU Kristen Panaikang	
14.	Tempat Berkumpul	TPU Kristen Pannara	
15.	Tempat Berjualan	TPU Kristen Pannara	

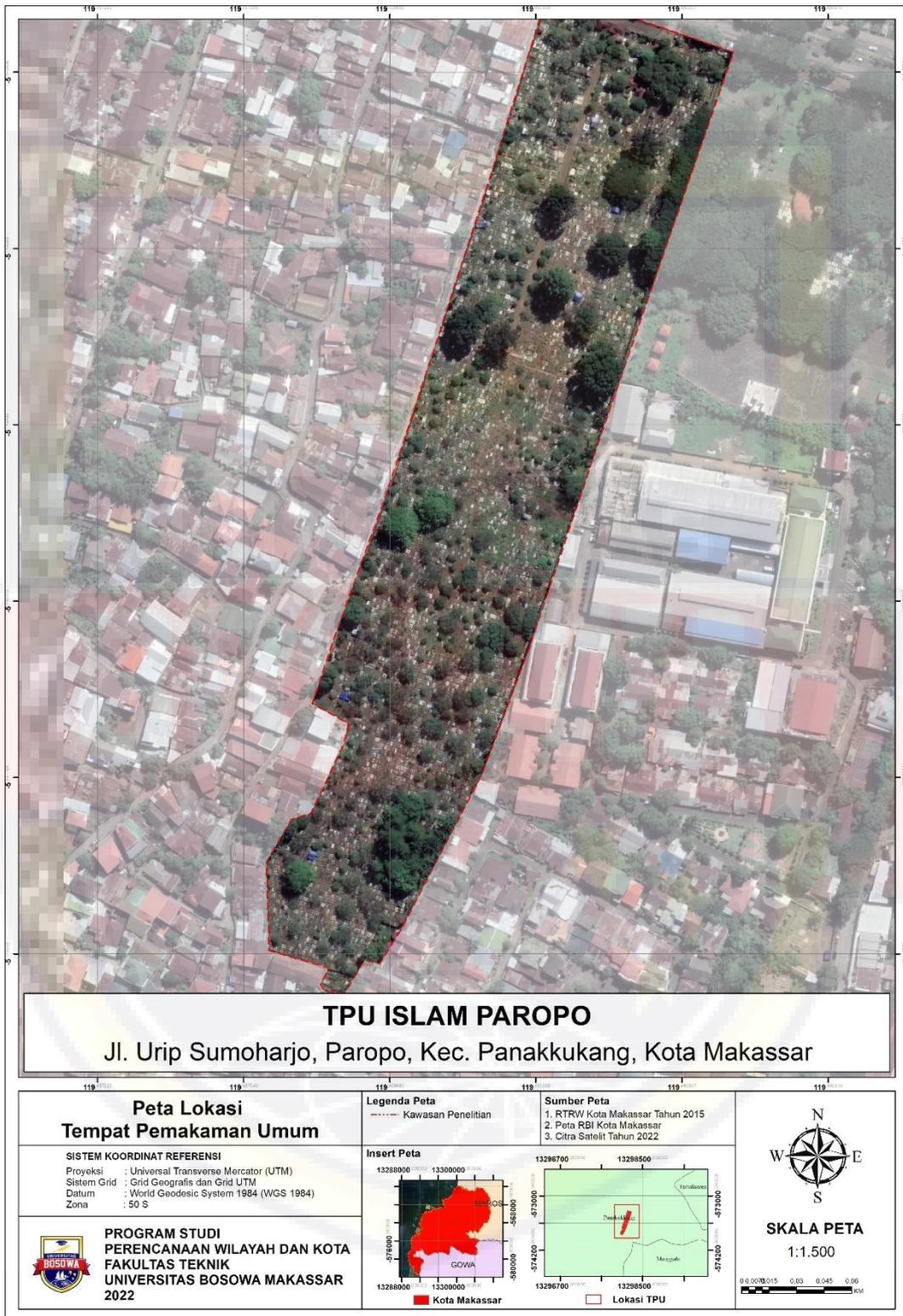
Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2022



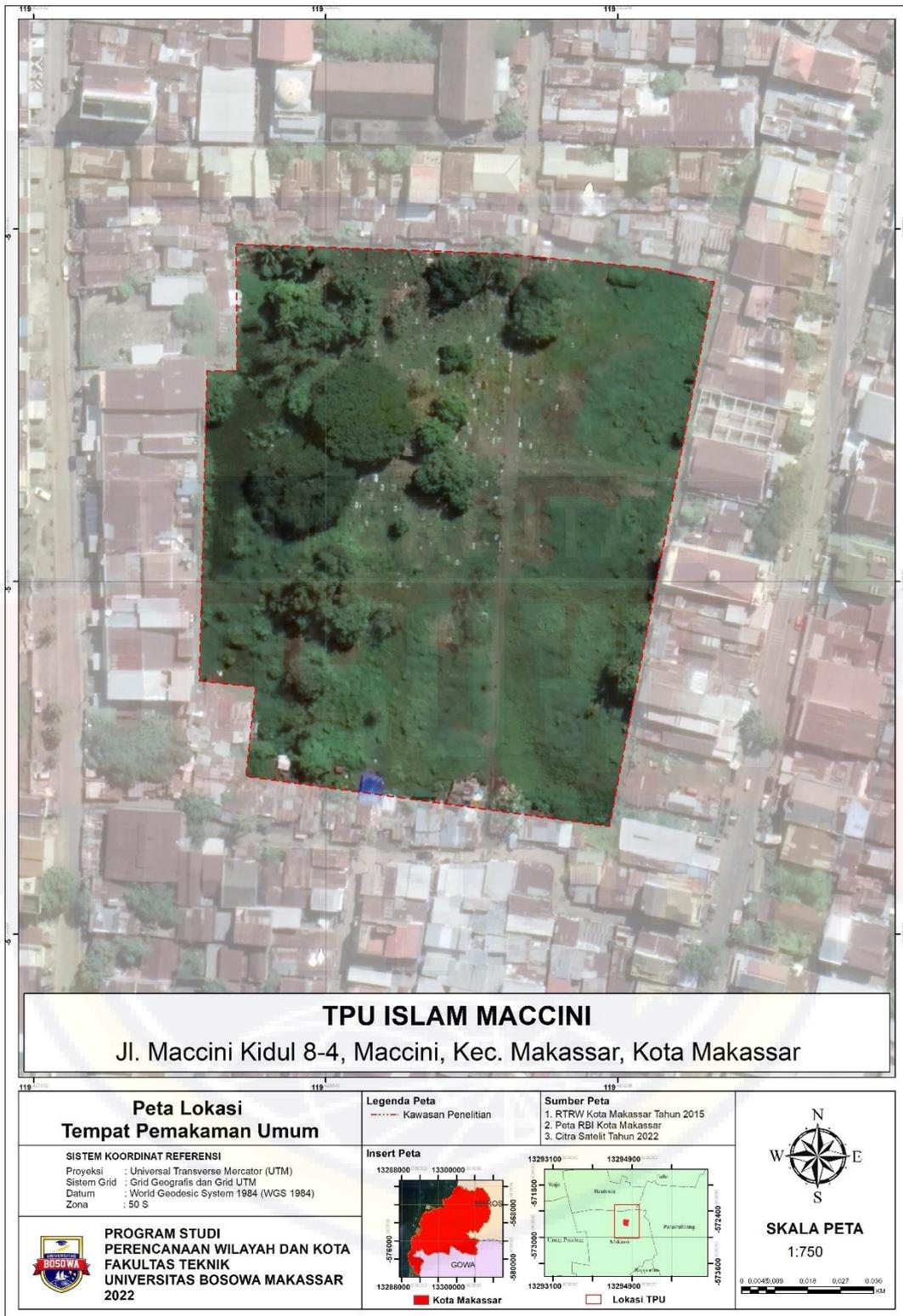
Gambar 4. 12 Peta Lokasi TPU Islam Dadi



Gambar 4. 13 Peta Lokasi TPU Islam Beroanging



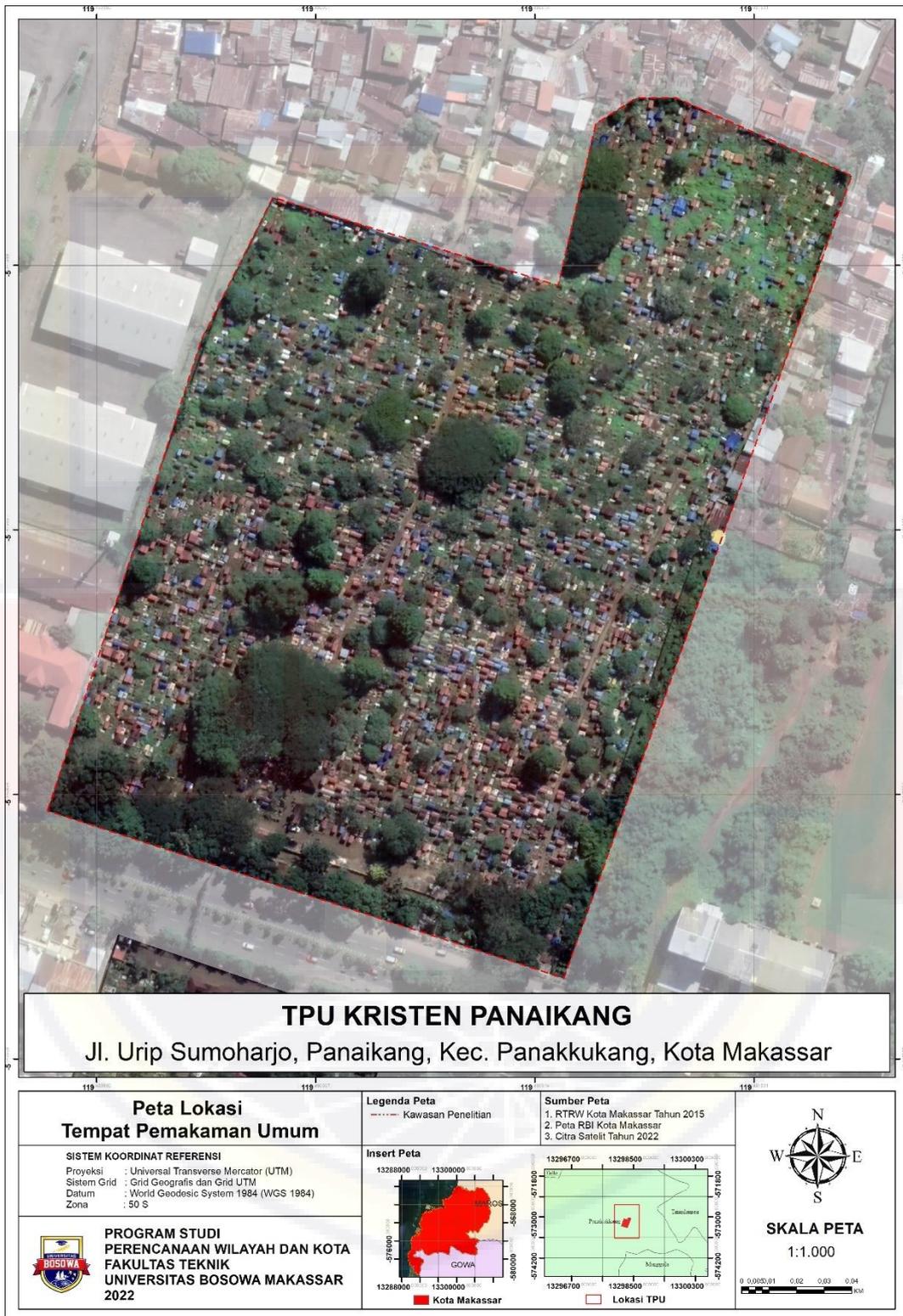
Gambar 4. 14 Peta Lokasi TPU Islam Paropo



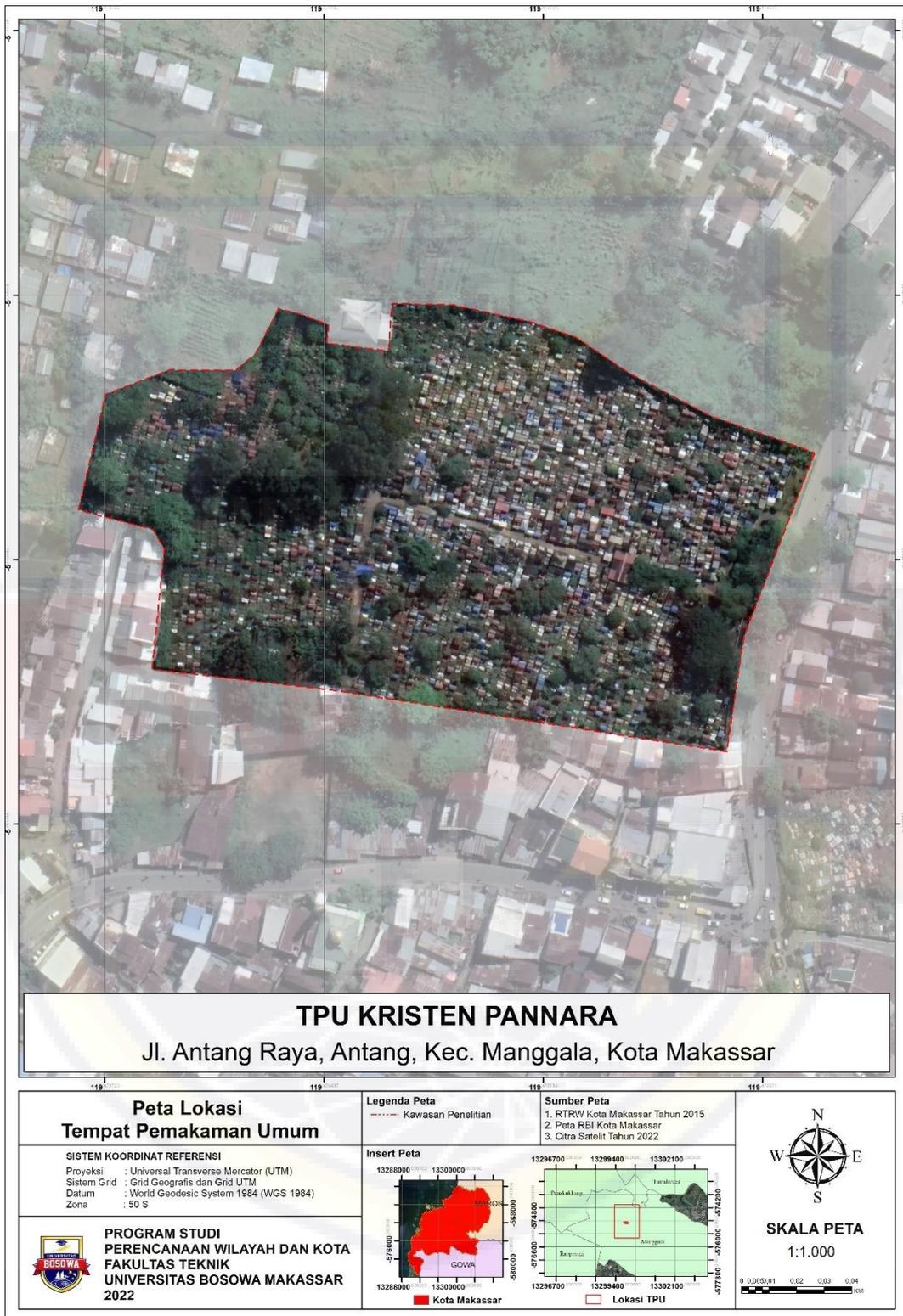
Gambar 4. 15 Peta Lokasi TPU Islam Maccini



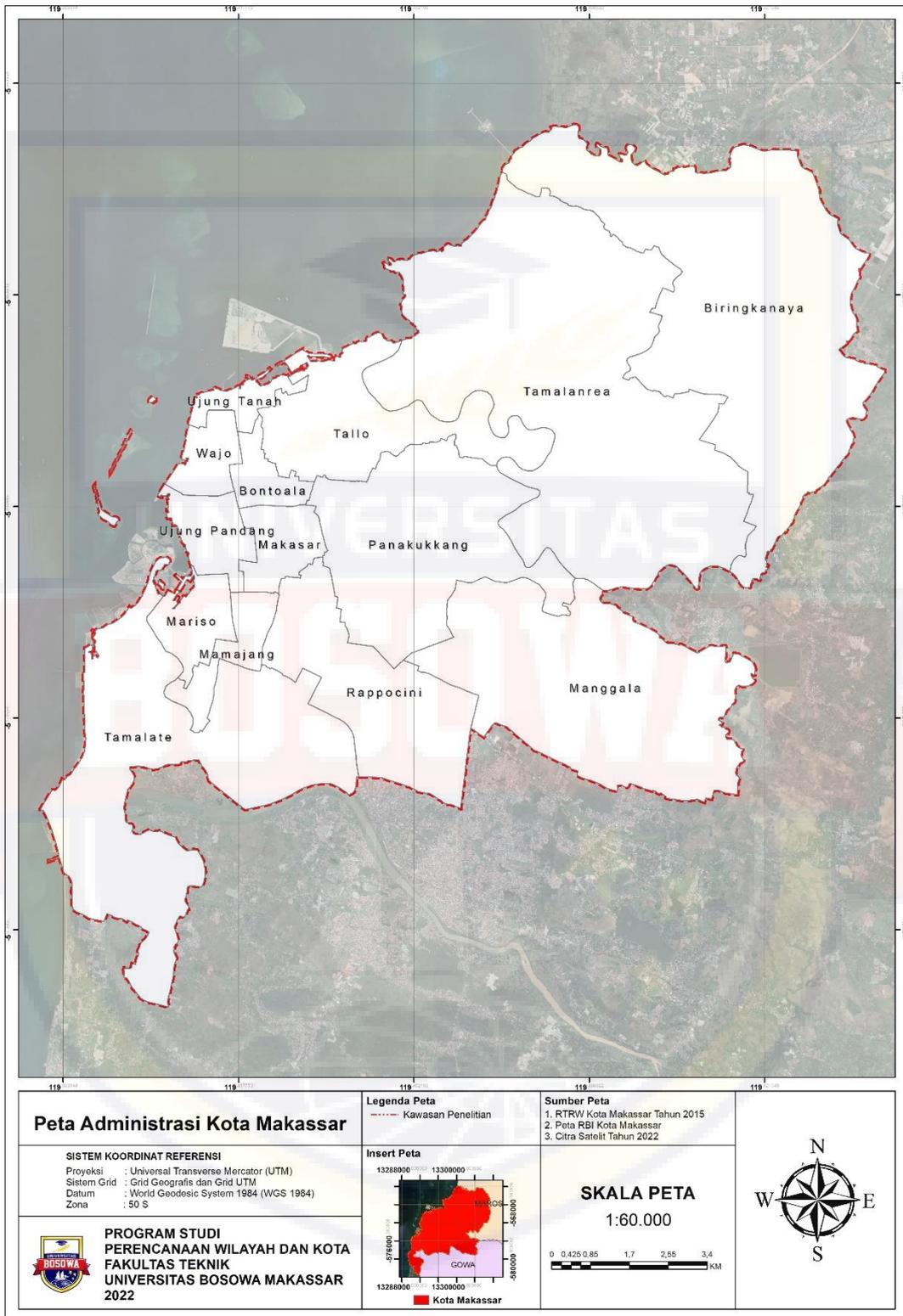
Gambar 4. 16 Peta Lokasi TPU Islam Sudiang Raya



Gambar 4. 17 TPU Kristen Panaikang



Gambar 4. 18 Peta Lokasi TPU Kristen Pannara



Gambar 4. 19 Peta Administrasi Kota Makassar

D. Daya Tampung Sebagai Ambang Batas

Setiap manusia yang lahir ke bumi ini akan merasakan kematian dan merupakan suatu hal yang pasti terjadi sedangkan luas lahan pemakaman hingga saat ini berbandingan terbalik dengan ketersediaan lahan makam yang baru. Hasil wawancara dengan beberapa mandor dan pengaws disetiap TPU menjelaskan bahwa di setiap tahunnya jumlah angka kematian semakin meningkat sehingga menyebabkan cara pemakaman yang dilakukan dengan sistem tumpuk terkecuali di TPU Sudiang Raya yang masih terdapat beberapa lahan makam baru.

Untuk mengetahui kemungkinan jumlah angka kematian di tahun berikutnya maka dilakukan analisis proyeksi kematian untuk 20 tahun kedepan yang dirinci per 5 tahun, berikut hasil proyeksi kematian di Kota Makassar.

Tabel 4. 8 Proyeksi Angka Kematian untuk 20 Tahun kedepan dirinci per 5 tahun di Kota Makassar

No	Tahun	Angka Kematian	r	e	Tahun Proyeksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	2017	3,422	0.10	2.72	2022 – 2026	8,303
2	2018	3,392			2026 - 2031	13,706
3	2019	3,837			2031 - 2036	22,624
4	2020	4,572			2036 - 2041	37,344
5	2021	5,030				

Sumber : Hasil Analisis ,2022

Hasil proyeksi angka kematian untuk 20 tahun kedepan menunjukkan bahwa angka kematian akan semakin meningkat sehingga dengan mengetahui hal tersebut dapat dilakukan perhitungan estimasi jumlah lahan yang akan digunakan masyarakat Kota Makassar dengan

menggunakan standar ukuran makam sebesar 2,5 m x 1,5 m termasuk jarak antar makam dengan estimasi kebutuhan lahan pemakaman. Untuk jumlah estimasi kebutuhan lahan pemakaman dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 4. 9 Estimasi Kebutuhan Jumlah Lahan Pemakaman di Kota Makassar dalam 20 tahun kedepan

No.	Tahun Estimasi	Estimasi Angka Kematian (Jiwa)	Estimasi Kebutuhan Lahan Pemakaman 2,5m x 1,5m (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2026	8.303	2,96
2.	2031	13.706	4,35
3.	2036	22.624	6,39
4.	2041	37.344	9,39

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel estimasi jumlah lahan yang akan digunakan untuk lahan pemakaman di Kota Makassar dalam jangka 20 tahun kedepan diketahui bahwa kebutuhan akan semakin meningkat sesuai dengan tingkat kematian sedangkan lahan pemakaman dari tahun ke tahun semakin berkurang tanpa adanya penambahan. Untuk saat ini lahan yang tersisa dari 7 lokasi TPU Pemakaman milik pemerintah di Kota Makassar adalah 0,33 ha yang hanya terdapat di TPU Sudiang Raya karena dari ke-6 lokasi TPU Pemakaman lainnya sudah penuh. Dengan sisa lahan tersebut dapat di estimasikan untuk daya tampung lahan pemakaman di Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 4. 10 Daya Tampung Lahan Pemakaman di Kota Makassar

No	Tahun Estimasi	Estimasi Angka Kematian (Jiwa)	Estimasi Kebutuhan Lahan Pemakaman 2,5m x 1,5m (Ha)	Ketersediaan Lahan Pemakaman di Kota Makassar (Ha)	Estimasi Sisa Lahan Pemakaman di Kota Makassar (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2026	8.303	2,96	0,33	-2,63
2.	2031	13.706	4,35		-4,02
3.	2036	22.624	6,39		-6,06
4.	2041	37.344	9,39		-9,06

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui daya tampung lahan pemakaman di Kota Makassar hanya tersedia 0,33 Ha. Sedangkan jumlah estimasi kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar hingga tahun 2041 (20 tahun kedepan) mencapai 9,39 Ha. Sehingga dapat diketahui bahwa ketersediaan lahan pemakaman di Kota Makassar tidak dapat menampung karena estimasi lahan pemakaman di Kota Makassar menunjukkan angka mines -9,06 Ha hingga tahun 2041 (20 tahun kedepan).

Analisis ini menunjukkan bahwa penerapan sistem penumpukan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar di masa yang akan datang. Sehingga pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman untuk 20 tahun kedepan dapat dilakukan dengan pengadaan lahan pemakaman baru dengan penambahan lahan baru sebanyak 9,39 ha untuk ukuran 2,5 m x 1,5 m.

E. Arahana Pengembangan Pemakaman di Kota Makassar

Untuk merumuskan arahan pengembangan pemakaman di Kota Makassar saya mencoba menggunakan Analisis SWOT untuk menghasilkan strategi yang dapat memberikan arahan, gambaran atau isu-isu yang terdapat di lokasi penelitian dengan mempertimbangkan Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threat (Ancaman).

1. Strength (Kekuatan)

Adapun Kekuatan yang dimiliki dalam upaya untuk arahan pengembangan pemakaman di Kota Makassar sebagai berikut:

- a. Terdapat Lahan Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Setempat.

2. Weakness (Kelemahan)

Adapun Kelemahan yang dimiliki dalam upaya untuk arahan pengembangan pemakaman di Kota Makassar sebagai berikut:

- a. Jumlah luas lahan pemakaman yang diprediksi hanya mampu menampung 0,33 ha
- b. Kurangnya ketersediaan lahan pemakaman di Kota Makassar.
- c. Masih banyaknya bentuk makam yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

3. Opportunities (Peluang)

Adapun Peluang yang dimiliki dalam upaya untuk arahan pengembangan pemakaman di Kota Makassar sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar.
- b. Peraturan Terkait Pengenaan Harga Patok Terhadap Masyarakat yang Bukan Penduduk Asli Kota Makassar.

4. Threat (Ancaman)

Adapun Ancaman yang dimiliki dalam upaya untuk arahan pengembangan pemakaman di Kota Makassar sebagai berikut:

- a. Angka Kematian yang Semakin Meningkat Pertahunnya.

Tabel 4. 11 Analisis SWOT

INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. Terdapat lahan pemakaman yang di kelolah oleh pemerintah setempat.	1. Jumlah luasan lahan pemakaman yang di prediksi hanya mampu manampung 0,33 ha 2. Kurangnya ketersediaan lahan pemakaman di Kota Makassar. 3. Masih banyaknya bentuk makam yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
EKSTERNAL	(SO)	(WO)
PELUANG (O)	(SO)	(WO)
1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar. 2. Peraturan terkait pengenaan harga patok terhadap masyarakat yang bukan penduduk asli kota makassar.	1. pengotimalisasian lahan pemakaman sesuai dengan peraturan daerah mengenai pelayanan pemakaman dan pengebuan mayat di kota makassar. 2. Pemanfaatan peraturan terkait pengenaan harga patok terhadap masyarakat yang bukan penduduk asli kota makassar untuk pengendalian keterbasan lahan pemakaman di Kota Makassar	1. Penyediaan lahan pemakaman yang baru oleh Pemerintah Kota Makassar sesuai dengan peraturan tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Makassar. 2. Penggalakan dan penegasan kebijakan terkait kesesuaian pelayanan pemakaman di Kota Makassar. 3. Penegasan Kebijakan terkait biaya pemakaman yang tidak sesuai kebijakan.
ANCAMAN (T)	(ST)	(WT)
1. Angka Kematian yang semakin meningkat Tahunannya	1. memperuntukan bagi pemerintah daerah kota makassar untuk menerapkan sistem penumpukan.	1. Memanfaatkan sistem pemakaman terpadu atau terstruktur bagi pemakaman yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Tabel 4. 12 Model Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS)

No.	Faktor-Faktor Strategi	Bobot	Nilai	Skor
Kekuatan (S)				
1.	Terdapat Lahan Pemakaman yang dikelola oleh pemerintah setempat.	1	3	3
Jumlah		1	3	3
No.	Faktor-Faktor Strategi	Bobot	Nilai	Skor
Kelemahan (W)				
1.	Jumlah Luasan Lahan pemakaman yang di prediksi hanya mampu manampung 0,33ha.	0,25	3	0,75
2.	Kurangnya ketersediaan lahan pemakaman di Kota Makassar.	0,50	1	0,50
3.	Masih banyak bentuk makam yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.	0,25	2	0,50
Jumlah		1	6	1,75

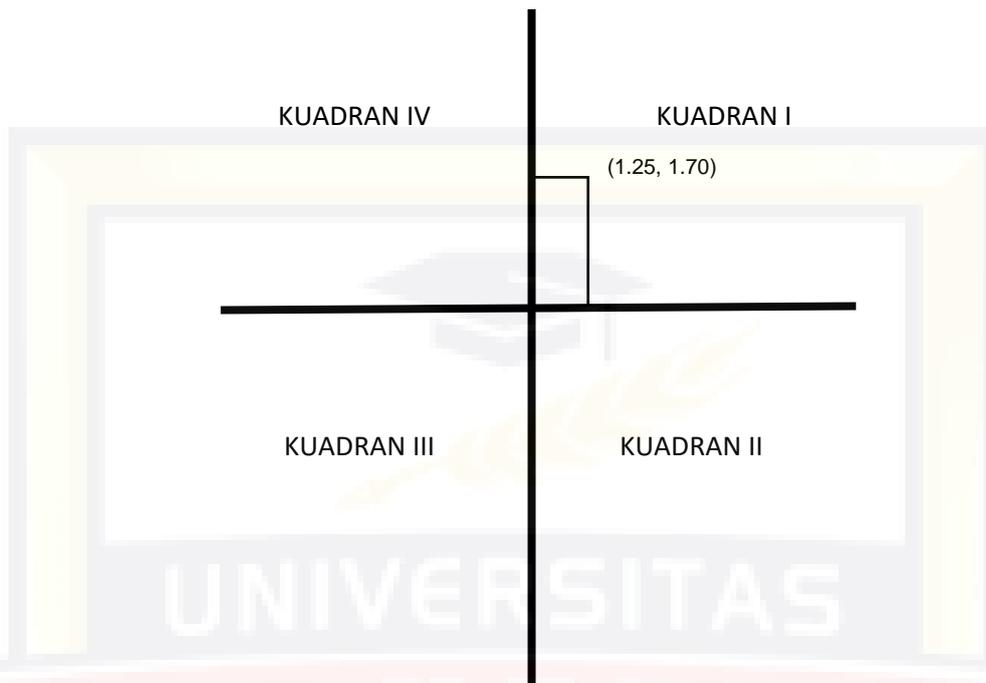
Tabel 4. 13 Model Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

No.	Faktor-Faktor Strategi	Bobot	Nilai	Skor
Peluang (O)				
1.	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar	0,70	3	2,1
2.	Peraturan Terkait Pengenaan Harga Patok Terhadap Masyarakat yang Bukan Penduduk Asli Kota Makassar.	0,30	2	0,60
Jumlah		1	5	2,70
No.	Faktor-Faktor Strategi	Bobot	Nilai	Skor
Ancaman (T)				
1.	Angka Kematian Semakin Meningkat pertahunnya.	1	1	1
Jumlah		1	1	1

Kesimpulan :

1. (IFAS) Hasil Kekuatan – Kelemahan adalah $3 - 1,75 = 1,25$

2. (EFAS) Hasil Peluang – Ancaman adalah $2,70 - 1 = 1,70$



Sumber : Hasil Analisis Tahun, 2022

Gambar 4. 20 KAUADRAN SWOT

Posisi berada pada sumbu $X = 1,25$ dan sumbu $Y = 1,70$ jadi posisi pada Kuadran I . Strategi yang digunakan dan diprioritaskan yaitu Strategi SO.

Rumusan Strateginya adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada dalam meminimalis kelemahan dan ancaman. Berikut adalah strategi yang digunakan untuk arahan pengembangan pemakaman di Kota Makassar :

1. Pengoptimalisasian lahan pemakaman sesuai dengan peraturan daerah mengenai pelayanan pemakaman dan pengebuan mayat di kota makassar seperti :

a. Pengoptimalisasian lahan Pemakaman

Pengoptimalisasian ini bertujuan untuk meningkatnya angka kematian disetiap tahunnya menyebabkan luas lahan pemakaman semakin berkurang sehingga diperlukannya pengoptimalisasian ini dalam penggunaan lahan pemakaman dengan menggunakan sistem per blok. Dalam satu blok memiliki ukuran 5 m x 3 m yang terdapat 2 makam dengan ukuran satu makam 2,5 m x 1,5 m yang setiap sisinya terdapat jarak antara makam sebanyak 1 m . Ukuran 1 m ini dipertuntukan untuk peziarah agar tidak melangkahi makam ataupun menginjaknya.

b. Pemakaman Terpadu atau Terstruktur

Kondisi di Kota Makassar yang saat ini memiliki lahan pemakaman yang sudah sangat terbatas bukan sebuah alasan untuk tidak memikirkan solusi yang terdapat dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Kota Makassar dapat melakukan kerja sama dengan beberapa Kabupaten tetangga seperti yang tergabung dalam Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) yang juga termasuk Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011.

Pengadaan pemakaman terpadu atau terstruktur ini dapat dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah Mamminasata namun pihak Kota Makassar tetap memberika sumbangsih dalam pengadaan lahan pemakaman tersebut seperti biaya pembebasan lahan

yang ditanggung dan lain sebagainya. Sehingga dalam system pemakaman terpadu pun ini diperlukan kerja sama antara daerah.

Sistem pemakaman terpadu atau terstruktur ini dilakukan dengan mempersiapkan seluruh prosesi kematian mulai dari tahap memandikan hingga menguburkan. Dalam pemakaman tersebut akan dilengkapi fasilitas seperti mobil pengantar jenazah, masjid, lahan parkir, jalan utama, jalan setapak (jalan untuk dilalui orang yang dimana diantara makam akan terdapat jalan setapak yang memudahkan peziarah agar tidak melangkahi atau menginjak makam) serta pada saat penguburan akan dilayani proses penggalian dan penutupan tanah makam, dipasangkan tenda, terdapat ustadz dan akan didokumentasikan.

2. Pemanfaatan peraturan terkait pengenaan harga patok terhadap masyarakat yang bukan penduduk asli kota makassar untuk pengendalian keterbatas lahan pemakaman di Kota Makassar dapat kita lihat dari peruntukan makam untuk masyarakat di Kota Makassar.

Kondisi lahan pemakaman di Kota Makassar sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang dimakamkan disetiap TPU milik pemerintah tidak hanya berdomisili didalam Kota Makassar namu terdapat beberapa masyarakat dari daerah lain juga seperti Jawa, Manado, Gorontalo dan lain-lainnya. Hanya saja, bagi mereka yang berasal dari daerah lain dikenakan biaya tambahan sekitar Rp.350.000 ribuh. Kondisi ini tentu akan mengurangi jumlah lahan pemakaman yang tersedia sehingga

sisalah pemakaman untuk pemenuhan kebutuhan lahan masyarakat kota Makassar semakin berkurang.

Lahan pemakaman yang tersisa hingga saat ini sebaiknya hanya diperuntukkan untuk masyarakat Kota Makassar saja dengan syarat memperlihatkan kartu tanda pengenal kepada pihak pelayanan pemakaman lalu kemudian dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sehingga terjadi sinkronisasi mengenai data jumlah penduduk. Peraturan ini harus dilakukan secara tegas agar mampu dilakukan pengoptimalisasian dalam pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis yang dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil identifikasi tempat pemakaman di Kota Makassar yang dimana diantaranya sebaran tempat pemakaman, kondisi tempat pemakaman, dan luasan lahan tempat pemakaman di Kota Makassar terdapat beberapa hasil yang dimana setiap pemakaman memiliki sebaran, kondisi dan luasan yang berbeda-beda serta aktivitas yang ada di setiap pemakaman berbeda-beda.
2. Berdasarkan hasil daya tampung menunjukkan bahwa ketersediaan lahan pemakaman di Kota Makassar tidak dapat lagi menampung dikarenakan jumlah estimasi kebutuhan lahan pemakaman yang di butuhkan hingga tahun 2041 sangatlah besar sedangkan daya tampung lahan pemakaman yang ada saat ini di Kota Makassar sangat terbatas sehingga estimasi kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar membutuhkan lahan yang luas.
3. Arah pengembangan pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar yaitu : Pengoptimalisasian lahan pemakaman sesuai

dengan peraturan daerah mengenai pelayanan pemakaman dan pengebumian mayat di kota makassar dan Pemanfaatan peraturan terkait pengenaan harga patok terhadap masyarakat yang bukan penduduk asli Kota Makassar untuk pengendalian keterbatasan lahan pemakaman di Kota Makassar dapat kita lihat dari peruntukan makam untuk masyarakat di Kota Makassar.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

a. Harusnya membuat aturan yang tegas akan ketertiban didalam pemakaman, aturan yang terkait dengan sistem penumpukan, dan aturan mengenai memberi bangunan di atas kuburan

b. sebaiknya melakukan kerja sama dengan kabupaten tetangga yang tergabung dalam Mamminasata untuk mewujudkan Kawasan pemakaman terpadu.

c. segera menetapkan solusi sebelum lahan yang tersisa saat ini menjadi penuh lagi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar.

2. Bagi penulis yang ingin melanjutkan penelitian ini dapat menganalisis lahan pemakaman umum untuk semua agar hasil yang didapat dalam penelitian tentang lahan pemakaman di Kota Makassar ini lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, A. (2017). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelayanan Pemakaman Di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Aji, A. S., Suprayogi, A., & Wijaya, A. P. (2015). Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip Vol.4 No.3*, 100.
- Amalia, G. (2016). *Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Makassar*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Arifin, Y. N. (2016). Optimalisasi Usaha Penyediaan Lahan Pemakaman dalam Kawasan Perumahan di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Geografi Volume 13 No.1*,80.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2021.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan UPT Pemakaman Kota Makassar.
- Farhan, N. (2016). Estimasi Kebutuhan Lahan Pemakaman Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Vol.1 No.1*, 152-153.
- Jalaluddin, M. (2013). Analisis Kesesuaian dan Ketersediaan Lahan serta Arah Pengembangan Komoditas Pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
- Kozlowski, J. (1997). *Pendekatan Ambang Batas Dalam Perencanaan Kota, Wilayah dan Lingkungan Teori dan Praktek*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muta'ali, L. (2012). *Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas

Geografi (BPFGE). (2015). *Teknik Analisis Regional*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar.

Tukiman. (2007). Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah. *Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial Vol.7 No.2*, 103.

Zuliyanto, A. (2015). *Penataan Lokasi Pemakaman Kota Malang Berbasis Geographic Information System Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

A. Nurkmawati. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman di Kota Makassar.

Muliarta Diputra, Ernady Syaodih, Identifikasi Permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandar Lampung.

Agustiah Wulandari, Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (TPU Kota Pontianak).

Ghea Amalia, Djaka Marwasta, Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Surakarta.

Kartini, (2018). Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar.

Muhammad Thoriq Ibnu Ziad, (2011). Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Sebagai Kontribusi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Sleman.

Ahmad Zuliyanto, (2015). *Penataan Lokasi Pemakaman Kota Malang Berbasis Geographic Information System Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Divyana Sudiro, Suhardjo, Ode Sofyan Hardi,(2020). Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum (Studi Kasus Tempat Pemakaman Umum Semper, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara).

APRYANTO, Dwi, Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP.,MSc.,Ph.D ,Eksistensi tempat pemakaman umum di Kota Jakarta Pusat.

Sandi , Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman di Dinas Pemakaman Dan Pertamanan Kota Bandung.



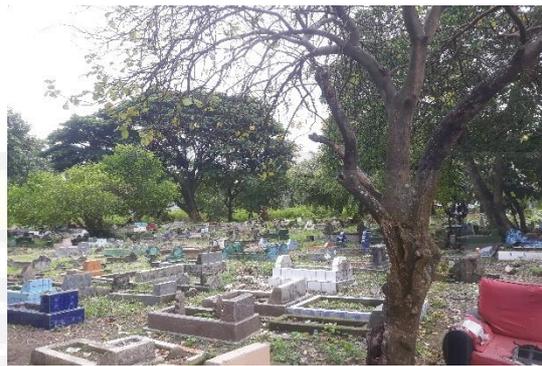


LAMPIRAN

BOSOWA

Visualisasi di Lapangan















UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD HILMY KHALIL AGUS, Lahir di Makassar, Pada Tanggal 17 Mei 2000. Peneliti memasuki jenjang Pendidikan TK Ujung Pandang Pada Tahun 2005 dan Tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD Negeri Sudirman IV Makassar), dan Tamat pada tahun 2012, ditahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 4 Makassar,

dan Tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 21 Makassar, dan Selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Bosowa Makassar melalui jalur ujian dan tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa Makassar.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan baik intra kampus maupun ekstra kampus. Penulis juga aktif dalam organisasi pengurus di Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK) Universitas Bosowa Makassar selama dua periode yakni menjabat sebagai anggota di bidang Ekonomi Kreatif Periode 2020-2021 dan Sebagai Kabid Ekonomi Kreatif pada Periode 2021-2022. Penulis juga Aktif di Organisasi Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia (IMPI) Anggota Devisi Kesejahteraan Lembaga Periode 2021-2022.